

Skripsi

**PEMIKIRAN POLITIK
MUHAMMAD JUSUF KALLA**



**Sebagai Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Kesarjanaan (S1)
Pada Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan**



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	0 - 6 - 09
Asal Dari	Ins. pol
Banyaknya	1 bly
Harga	1 bndi
No. Inventaris	21
	SKR-S 09 RAI S

Oleh:
Muhammad Rais
E 111 04 022

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Makassar
2009**



Aku pernah bermimpi kuliah di universitas hasanuddin

Aku pernah berharap dipanggil sebagai mahasiswa

Aku pernah bercita-cita menjadi seorang sarjana

Alhamdulillah....

Aku tidak lagi sedang bermimpi

Aku tidak lagi hanya berharap

Aku telah meraih cita-cita itu

Aku kini telah SARJANA

**Gelar kesarjanaan ini kusematkan
Kepada Emming dan Daeng tercinta
Sebagai bukti cinta dan baktiku,
Kepada wanita pujaan hatiku
Seorang wanita yang kugelari Ma'sumah
Skripsi ini kupersembahkan
Sebagai hadiah cintaku kepadamu.**

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi

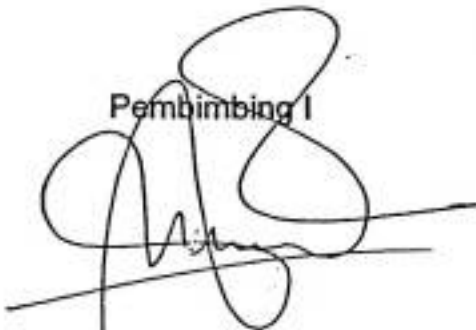
PEMIKIRAN POLITIK MUHAMMAD JUSUF KALLA

yang dipersiapkan dan disusun oleh
Muhammad Rais
E111 04 022

dinyatakan telah
mengikuti ujian skripsi
pada tanggal, Juni 2009

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Armin Arsyad, M.Si
NIP.131 961 985

Pembimbing II



Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si
NIP.132 205 466

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Politik dan
Ilmu Pemerintahan



Dr. Armin Arsyad, M.Si
NIP. 131 961 985

Ketua Program Studi
Ilmu Politik



Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si
NIP. 132 205 466

LEMBARAN PENERIMAAN

Skripsi

PEMIKIRAN POLITIK MUHAMMAD JUSUF KALLA

yang dipersiapkan dan disusun oleh
Muhammad Rais
E111 04 022

telah diperbaiki
dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
pada Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Juni 2009

Menyetujui:

Panitia Ujian

Ketua : Dr. Armin Arsyad, M.Si

Sekretaris : Sukri, S.IP., M.Si

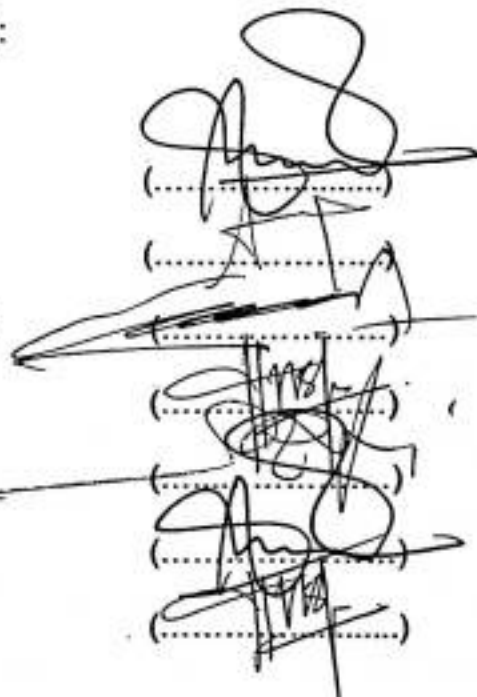
Anggota : Dr. Muhammad Al Hamid, M.Si

Anggota : Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si

Anggota : A. Naharuddin, S.IP., M.Si

Pembimbing I : Dr. Armin Arsyad, M.Si

Pembimbing II : Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



"Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayahNya sehingga skripsi yang berjudul **"Pemikiran Politik Muhammad Jusuf Kalla"** ini dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk usul, saran ataupun kritik yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya.

Pada kesempatan yang baik ini pula, penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Abd. Rahman Makka dan ibunda P. Maraming yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta pengorbanan tiada henti, yang hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya. Maafkan jika ananda sering menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan ibunda dan ayahanda. Keselamatan dunia akhirat semoga selalu untukmu. Semoga Allah selalu menyapamu dengan Cinta-Nya. Kesehatan dan limpahan rejeki selalu tercurah untukmu berdua. Doa ananda semoga engkau berdua diberi umur yang panjang agar ananda dapat membalas tetesan air mata dan cucuran keringatmu dengan kebahagiaan. Semoga ananda menjadi anak soleh yang mampu

mewujudkan harapan-harapanmu duhai Emming dan Daengku. Kepadamu berdua gelar kesarjanaan ini kusematkan sebagai bukti cinta dan bakti ananda.

2. Saudara - saudaraku Jamaluddin dan Rahmatia, engkau telah menjadi contoh dan kakak yang baik buat adikmu ini. Begitu pula buat adik-adikku Lifia Hastuti dan Muhammad Ridwan, engkau telah menjadi adik yang baik. Keceriaan wajahmu dan senyum manismu selalu hadir dan menghibur dikala kakak kesepian. Semoga masa depan yang cerah selalu bersamamu.
3. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp. BO. FICS selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf.
4. Bapak Deddy T. Tikson, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf.
5. Bapak Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan FISIP UNHAS. Beliau sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah mendorong, membantu, dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Nasihat dan pelajaran berharga dari beliau akan senantiasa terlukis di hati penulis.
6. Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UNHAS. Beliau sekaligus sebagai Pembimbing II yang dengan cinta dan penuh kelembutan layaknya seorang Ibu membantu, memotivasi, dan mengoreksi skripsi sampai menjadi karya yang hampir sempurna seperti ini.
7. Segenap dosen-dosen FISIP UNHAS khususnya dosen Ilmu Politik: Bpk Muhammad Saad, Bpk A. Ya'kub, Bpk Muhammad, Bpk A. Naharuddin, Bpk

Jayadi Nas, Bpk A. Sukri, Kanda Anto dan Kanda Ina. Mohon maaf atas kata, tingkah laku, dan bantahan-bantahan akademik yang tak berkenan selama kebersamaan di perkuliahan.

8. Orang Tuaku yang kedua Hj. Fatimah. Engkau tidak hanya memberiku tumpangan di istananya, tetapi telah memberiku doa di hati dan sujudnya. Atas segala cinta, sejarah hidup, petuah, dan motivasimu semoga ananda dapat membalasnya dengan kebahagiaan di suatu saat. Doa ananda semoga engkau diberi kekuatan, kesehatan, dan umur yang panjang.
9. Abangku Prof. Dustin Cowell yang telah memberi bantuan moril dan materil. Kepadamu kupersembahkan rasa terima kasihku yang tak terhingga. Engkau telah memberi bantuan yang begitu besar untuk kelanjutan akademikku. Engaku menolong dikala saya butuh, engaku memberi dikala saya meminta. Semoga suatu saat nanti, saya dapat membalas jasa-jasamu dengan bantuan dan kebahagiaan yang lebih.
10. Saudara-saudara seperjuanganku di Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan wilayah sulawesi selatan. Saudara seperjuanganku di Lembaga Kajian Ukhuwah Mahasiswa Muslim Unhas (LK-USWAH). Saudara seperjuanganku di FKI BEM Fisip Unhas dan Forum Mahasiswa Islam Fisip Unhas. Aksi demonstrasi damai, pasang spanduk, bagi-bagi liflet, tempel poster, pawai-pawai di malam hari, diskusi pelataran, dialog tepi danau, seminar-seminar nasional, sahur bareng, buka puasa bersama, tidur di istana berukuran 2 x 4 meter, rapat dini hari, bina kader dengan dana terbatas, jalan kaki karena

kehabisan uang, dan kebersamaan-kebersamaan yang lain. Wahai kawan....aktivis pun bisa sarjana sebagai lulusan terbaik dan dalam waktu yang ideal. Mari teruskan perjuangan dan pertahankan idealisme yang telah mengkristal dalam diri ini. Hidup mulia dan mati indah.

11. Rekan-rekan seperjuangan di Forum Alumni SMA Kelas III Khusus LPMP Sulawesi selatan. Saudaraku Pu2t (Putra Handayani), Mr. Chang (Saharuddin), Ikhsan (Iccang). Terima kasih telah bersama dan loyal dengan kepemimpinan ini. Sejarah telah mencatat kita. Mari teruskan perjuangan mencerdaskan generasi. Generasi idaman generasi pemimpin bukan generasi pemimpi.
12. Rekan-rekan di Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) Fisip Unhas. Semoga saya terbebas dari janji yang belum sempat terlaksana dalam era kepemimpinanku. Saudaraku Ata', Antarisna, Paijo, Irfan, Ais, dan semua 04 yang belum sempat dituliskan. Hormatku buat segenap senior dan salam perjuangan buat segenap warga Himapol. Perjuangan dan kebersamaan di bumi Fisip, tanah Biru Kuning telah menjadi bagian sejarah hidup. Perjuangan takkan berhenti walau jalan tak mulus. Jayalah Himapolku, Himapolmu, Himapol kita semua. Bersama, bersatu, berjaya.
13. Buat seorang wanita yang begitu istimewa. Aku memanggilnya Ma'sumah. Dia telah menjadi cahaya bagi hidupku. Dia jauh secara fisik tapi selalu dekat dan ada dalam hatiku. Dia menjadi penguatku ketika aku lemah, menjadi pengingat ketika aku sempat lupa, menemaniku dikala kesepian, menghiburku disaat sedih, bersamaku ketika orang menjauh dariku. Aku sedih karena dia

dan bahagiapun karena dia. Aku sematkan gelar Ma'sumah kepadanya. Doaku semoga dia jodoh terbaik yang ditakdirkan Allah SWT untukku. Kehadiranmu adalah anugerah terindah buatku. Mencari dan menemukan seribu orang bukanlah keajaiban, tetapi keajaiban itu adalah bertemu denganmu. Yakinlah, bahwa insya Allah, Allah SWT akan mengijabah doa disetiap sujud kita, doa agar kita bisa bersama mengarungi kehidupan ini. Kepadamu ya Ma'sumah skripsi dan gelar kesarjanaan ini kuhadiahkan.

14. Seluruh keluarga, kakak-kakak sepupu, sahabat di Komunitas Bola Macca H&R dan handai taulan yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Selain itu, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis pernah melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Hasanuddin hingga menyelesaikan studi. Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan. Adapun mengenai kebaikan-kebaikan penulis, itu semata-mata datangnya dari Allah SWT, karena segala kesempurnaan hanyalah milik-Nya.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya dan dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin!

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Mei 2009

Penulis

ABSTRAK

Muhammad Rais, 2009. "Pemikiran Politik Muhammad Jusuf Kalla" dengan Pembimbing I Dr. Armin Arsyad, M.Si dan Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si selaku Pembimbing II.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2009 yang bertujuan untuk mengetahui pemikiran politik Muhammad Jusuf Kalla. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tentang pemikiran H.M. Jusuf Kalla tentang konflik. Masyarakat juga dapat mengetahui pemikiran dan strategi politik H.M. Jusuf Kalla dalam menyelesaikan konflik di Poso, Ambon, Aceh, dan Papua. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang menaruh minat besar untuk melakukan penelitian tentang pemikiran politik.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Metode ini lebih menekankan pada analisa dan pemaknaan kata karena menyangkut pemikiran tokoh. Kemudian jenis penelitian adalah life history yang dimaksudkan untuk mengetahui reaksi, interpretasi, tanggapan, dan pandangan objek yang diteliti. Adapun metode pengumpulan datanya yakni dengan melakukan studi pustaka dari berbagai sumber. Setelah mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan permasalahan, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa H.M. Jusuf Kalla memiliki pemikiran politik. Inti pemikiran politiknya adalah bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki sifat manusiawi dan sifat kebinatangan. Kalau sifat manusiawi dominan maka keadaan akan aman dan damai. Sebaliknya, ketika sifat kebinatangan yang dominan dalam diri manusia maka terjadilah konflik. Oleh karena itu, kalau konflik ingin dihentikan secara damai maka H.M. Jusuf Kalla berupaya untuk membangkitkan kembali sifat-sifat manusiawi pada pihak-pihak yang berkonflik. Pemikiran politiknya tersebut sederhana, tegas, dan rasional. Pemikirannya terbukti dapat melahirkan strategi-strategi cemerlang dalam menyelesaikan konflik seperti di Poso, Ambon, Aceh, dan Papua.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENERIMAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pemikiran Politik.....	11
B. Pemikiran Politik H.M. Jusuf Kalla	18
1. Riwayat Hidup H.M. Jusuf Kalla	18
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemikiran.....	23
3. Pemikiran Politik H.M. Jusuf Kalla.....	24
C. Teori Konflik.....	27
1. Sumber Konflik	29
2. Tujuan Konflik.....	30

3. Prinsip Pemecahan Konflik.....	31
D. Kerangka Pikir	34
E. Skema Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Metode Penelitian	37
B. Jenis Penelitian.....	37
C. Metode Pengumpulan Data	38
E. Metode Analisis Data	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Konflik Poso	43
1. Latar Belakang Konflik.....	43
2. Deklarasi Malino.....	46
B. Konflik Ambon	51
C. Konflik Aceh.....	59
1. Latar Belakang Konflik	59
2. Strategi H.M. Jusuf Kalla.....	69
D. Konflik Papua	79
1. Keadaan Sosial Budaya	79
2. Konflik dan Penyelesaiannya.....	83
BAB V PENUTUP	91
A. Simpulan	91
B. Saran.....	92
Daftar Pustaka	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu perubahan politik yang mendasar berlangsung di Indonesia. Sejak kekuasaan rezim Orde Baru di bawah kendali Soeharto mengalami keruntuhan di penghujung bulan Mei 2008. Perubahan politik itu ditandai dengan mundurnya Soeharto sebagai presiden setelah memegang jabatan itu selama 32 tahun. Berakhirnya rezim Orde Baru berarti pula bahwa Indonesia memasuki zaman reformasi atau era transisi demokrasi.¹

Reformasi bagi rakyat Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai jatuhnya kekuasaan otoriter Soeharto, tetapi juga diharapkan mampu memberi ruang politik yang lebih terbuka kepada publik. Era reformasi bahkan disebut oleh Nurkholis Majid² sebagai era kemerdekaan kedua setelah Indonesia dijajah oleh Orde Baru. Posisi Negara yang begitu kuat (*powerfull*) selama era orde baru, mulai berkurang dan diimbangi oleh gerakan masyarakat. Masyarakat mulai berani tampil di depan publik dan menyampaikan kritik serta pandangannya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Wajar kalau aktor-aktor politik pun semakin bermunculan dengan pemikiran politiknya masing-masing.

Pemikiran politik merupakan suatu proses berpikir yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai sistem politik yang ideal. Pemikiran politik merupakan

¹ Adi Suryadi Culla, 2006. *Rekonstruksi Civil Society, Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, hal. 1

² Sunardi, et al, 2005. *Republik "Kaum Tikus", Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Jakarta: EDSA Mahkota, hal. 27

bidang yang sangat menarik dalam bidang ilmu politik. Mempelajari pemikiran politik seorang tokoh/ilmuwan politik tidak saja membawa pemahaman seorang pemikir terhadap sesuatu masalah politik yang menjadi pusat perhatiannya, tetapi juga terkadang dihadapkan pada perdebatan antara pemikir. Untuk menentukan apakah pemikiran itu bersifat politis atau tidak yakni dengan melihat manifestasinya, yaitu pada sikap, tanggapan, ucapan, tulisan, dan perilakunya³.

Seorang pemikir politik tidak bisa lepas dari lingkungan dan manusia lainnya. Ia senantiasa akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan realitas empirik yang ada dalam jangkauan pengamatannya. Hasil analisisnya kemudian akan dilontarkan kepada masyarakat dimana ia berada. Hal inilah yang akan menjadi landasan bagi seorang pemikir untuk berkiprah sebagai tokoh politik.

Pemikiran politik itu sendiri terbagi atas dua, yakni pemikiran politik murni dan pemikiran politik reaksional. Pemikiran politik murni adalah pemikiran politik yang lahir dari kedalaman proses berpikir seseorang. Hasil pemikiran murni tersebut kadangkala merupakan teori politik dan dijadikan landasa teori dalam ilmu politik. Sementara pemikiran politik reaksional merupakan pemikiran yang lahir dan muncul sebagai respon terhadap fenomena politik yang terjadi. Pemikiran politik H.M. Jusuf Kalla lebih banyak merupakan pemikiran politik reaksional yakni pemikiran yang muncul karena adanya fenomena politik yang kemudian direspon.

Pemikiran politik yang reaksional juga terbagi atas dua, yakni pemikiran politik reaksional yang bernilai positif dan negatif. Pemikiran politik itu dikatakan

³ Nazaruddin Syamsuddin, 1988, *Soekarno: Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*. Jakarta: Rajawali Press, Kata Pengantar, hal XI

positif jika memberikan persetujuan atau dukungan terhadap fenomena politik yang sedang direspon. Begitu pula sebaliknya, pemikiran politik reaksional akan dikatakan bernilai negatif jika tidak sepatutnya atau tidak mendukung fenomena politik yang terjadi.

Salah seorang pemikir politik di negeri ini adalah Bapak H. M. Jusuf Kalla. Pada awalnya lebih dikenal sebagai seorang saudagar sukses Bugis-Makassar. Sebagai anak kedua, beliau mendapatkan amanah untuk melanjutkan dan mengembangkan perusahaan keluarga yang telah dirintis oleh ayahnya. Perusahaan NV Haji Kalla Trading Company⁴ bergerak di bidang perdagangan mobil, kontraktor bangunan, jembatan, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan, perikanan, kelapa sawit, dan telekomunikasi. Perusahaannya tidak hanya di KTI tetapi sudah tersebar di luar pulau Sulawesi.

Nama H.M. Jusuf Kalla mulai terkenal setelah bergulirnya era reformasi, tepatnya ketika Presiden B.J. Habibie digantikan oleh KH. Abdurrahman Wahid. Di dalam kabinet beliau diangkat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Posisi dan jabatan sebagai menteri mengharuskannya tampil di berbagai forum. Hampir di setiap kesempatan, pidato-pidato dan ide yang disampaikan didengar dan dipublikasikan oleh media. Disinilah beliau semakin dikenal oleh publik dan memantapkan posisinya selain sebagai pengusaha sukses juga sebagai politikus.

H.M. Jusuf Kalla semakin mencitrakan dirinya sebagai seorang politikus ketika menjadi salah seorang calon kandidat presiden dalam konvensi partai Golkar.

⁴ S. Sinansari Ecip, *Peryunting*. 2000. *Percikan Pemikiran M. Jusuf Kalla: Mari ke Timur!* Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, hal XVIII.

Walaupun kemudian mundur dari pencalonan itu dan bergabung bersama Susilo Bambang Yudoyono. Pada pemilu 2004, terpilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia hingga sekarang.

Sebagai wakil presiden, hampir setiap saat harus berbicara di depan publik, baik untuk memberikan tanggapan maupun untuk mengklarifikasi atas berbagai permasalahan kenegaraan. Dalam keadaan seperti inilah, pemikiran-pemikirannya khususnya pemikiran politiknya terwacanakan dan tersampaikan ke publik. Beberapa pemikiran politiknya seperti bagaimana rasionalisasi pemerintah untuk menaikkan harga BBM dengan alasan karena subsidi BBM kebanyakan dinikmati oleh kalangan yang berpenghasilan menengah ke atas. Pemikirannya tentang bagaimana mengurangi dampak kenaikan BBM dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rakyat miskin. Kemudian pemikiran tentang bagaimana mengkonversi penggunaan minyak tanah ke gas elpiji. Pemikirannya tentang bagaimana mewujudkan perdamaian di daerah konflik. Pemikirannya tentang kesejahteraan dan tentang penanganan kasus bencana alam di berbagai daerah, serta pemikiran-pemikirannya yang lain.

Salah satu pemikiran H.M. Jusuf Kalla yang menarik untuk dikaji adalah tentang konflik. Pemikiran ini menarik untuk diteliti selain karena hal ini belum pernah diteliti sebelumnya juga karena mengingat banyaknya daerah di Indonesia yang sedang berkonflik. Ada daerah yang sudah berkonflik puluhan tahun lamanya seperti di Ambon dan Aceh yang tak kunjung selesai⁵. Dampak dari konflik tidak

⁵ Ahmad Shihab, 2007. *Muhammad Jusuf Kalla Mewujudkan Perdamaian Berkarya & Berprestasi*. Jakarta: PEACE People Aspiration Center, hal 5

sedikit. Banyak rumah yang dibakar, kantor pemerintah dan fasilitas umum juga dirusak, jalanan diblokir, kebun dan sawah tidak tergarap, hewan ternak tidak terurus bahkan tidak bertuan, rakyat setiap saat terancam keselamatannya. Bahkan di daerah konflik juga bermunculan gerakan-gerakan separatisme yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada akhirnya, konflik yang dibiarkan terus menerus terjadi tanpa penyelesaian yang mendasar dan menyeluruh akan menambah kesengsaraan masyarakat.

Pada dasarnya konflik politik disebabkan oleh dua hal. Konflik politik mencakup kemajemukan horisontal dan kemajemukan vertikal. Kemajemukan horisontal yakni struktur masyarakat yang majemuk secara kultur dan sosial seperti suku, agama, ras, profesi (petani, karyawan, PNS, militer, pedagang), dan sebagainya. Sedangkan kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan.

Konflik tidak terjadi secara tiba-tiba hanya karena adanya kemajemukan horisontal dan vertikal dalam masyarakat. Pada faktanya masyarakat dapat menerima perbedaan-perbedaan tersebut. Perbedaan dalam masyarakat baru akan menimbulkan konflik jika terdapat perbedaan kepentingan.

Kecenderungan konflik yang terjadi di berbagai daerah seperti Poso dan Ambon adalah karena perebutan sumber yang sama seperti kekuasaan, kekayaan, kesempatan, dan kehormatan. Pada awalnya, kehadiran pendatang di daerah tersebut tidak membuat penduduk asli khawatir dan terganggu. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu ternyata kehidupan ekonomi pendatang lebih baik dari mereka. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial. Penduduk asli merasa sumber-sumber

ekonominya direbut oleh kaum pendatang. Perebutan sumber yang sama inilah yang menjadi pemicu terjadinya konflik. Sementara agama, suku, dan ras hanyalah menjadi alasan pembenar untuk berkonflik.

Penyebab konflik di Poso dan Ambon tentu berbeda dengan penyebab konflik di Aceh dan Papua. Konflik Ambon dan Poso adalah konflik antar kelompok masyarakat di daerah tersebut untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber yang dimiliki. Sementara itu, konflik di Aceh dan Papua melibatkan kelompok masyarakat di daerah tersebut dengan pemerintah pusat. Adanya ketidakadilan ekonomi menjadi salah satu pemicunya. Sebagai contoh, Papua yang memiliki tambang emas tetapi justru merupakan propinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia⁶. Masyarakat Papua kecewa karena pemerintah pusat lebih banyak mengalokasikan dana yang diperoleh dari tambang emas di daerahnya untuk pembangunan di pulau Jawa. Begitu pula dengan yang dialami Nangroh Aceh Darussalam. Aceh yang memiliki gas alam yang besar justru menduduki posisi ke-4 sebagai propinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Hasil eksplorasi kekayaan alam di daerah tersebut justru lebih banyak dinikmati pusat ketimbang daerah, sehingga timbul keinginan daerah-daerah seperti Aceh dan Papua untuk merdeka.

Menurut H.M. Jusuf Kalla, bagaimanapun bentuknya dan dengan alasan apapun itu konflik harus segera diselesaikan. Konflik dalam pandangan H.M. Jusuf Kalla merupakan penghalang utama masyarakat tidak sejahtera. Dengan demikian, konflik harus secepatnya diakhiri. Disinilah nilai lebih dari seorang H.M. Jusuf Kalla

⁶ Muhammad Rais, 2006, *Strategi Pengelolaan Tambang di Indonesia Dalam Mewujudkan Masyarakat Sejahtera*, sebagai peserta dalam Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) bidang Ilmu Pengetahuan Sosial PIMNAS XLX, hal 18

karena mampu menjadi juru damai yang handal. Beberapa daerah yang berkonflik sejak zaman pemerintahan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, sampai pada pemerintahan Megawati Sukarnoputri yang masih terus berkejolak. Tetapi tatkala kasus tersebut ditangani oleh H.M. Jusuf Kalla, konflik seperti di Aceh, Poso, Ambon, Maluku akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Tentu metode dan gaya penyelesaian konflik yang ditawarkannya patut untuk diteliti sebagai upaya untuk mencegah disintegrasi bangsa.

Pemikiran politik H.M. Jusuf Kalla tentang konflik semakin menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi. Selain karena hal itu penting untuk diketahui secara umum juga karena pemikiran-pemikirannya sedikit banyaknya masih dipengaruhi oleh pemikiran bisnis. Menurutnya, kesempatan merupakan salah satu prinsip yang turut menentukan keberhasilan, termasuk dalam politik. Hal inilah yang membuat penulis semakin tertarik untuk meneliti tentang "Pemikiran Politik Muhammad Jusuf Kalla."

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang dipaparkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin dikaji yaitu bagaimana pemikiran politik H.M. Jusuf Kalla dalam menyelesaikan konflik di Poso, Ambon, Aceh, dan Papua?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pemikiran politik H.M. Jusuf Kalla dalam menyelesaikan konflik di Poso, Ambon, Aceh, dan Papua.



D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat membuahkan hasil yang maksimal dan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat bermanfaat :

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam bidang akademik yakni:

- a. Sebagai informasi kepada para pembaca tentang pemikiran politik H.M. Jusuf Kalla tentang konflik di Poso, Ambon, Aceh, dan Papua.
- b. Sebagai informasi kepada para pembaca tentang penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh H.M. Jusuf Kalla.
- c. Sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini selain bermanfaat dalam akademik juga diharapkan akan memberi manfaat praktis yakni:

- a. Sebagai bahan masukan kepada rakyat Indonesia yang ingin memilih H.M. Jusuf Kalla sebagai pemimpin di negeri ini.
- b. Sebagai bahan referensi kepada teman-teman mahasiswa, dosen, dan kepada pihak lain yang menaruh minat besar atau yang ingin melakukan penelitian yang serupa tentang konsep pemikiran politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA



Dalam bab ini akan dibahas empat sub-pokok bahasan, yakni tentang pemikiran politik, pemikiran politik H.M. Jusuf Kalla, teori-teori tentang konflik, kerangka pikir, dan skema kerangka pikir.

A. Pemikiran Politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemikiran adalah proses, cara, perbuatan memikir; problem yang memerlukan pemecahan.⁷ Definisi pemikiran secara umum menunjukkan bahwa pemikiran dimaknai sebagai proses yang dilakukan oleh seorang individu terhadap suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan atau penyelesaian.

Pemikiran menurut Muhammad Ismail yakni,

"Pemikiran adalah suatu penangkapan suatu kenyataan dengan perantara indera ke otak disertai informasi seluruhnya tentang fakta tersebut yang berfungsi menafsirkannya. Dikatakan 'penangkapan' bukan gambarannya. Sebab, yang ditangkap adalah pencerapan fakta, bukan gambaran fakta tersebut seperti halnya gambaran fotografi (potret) yang merupakan gambar suatu kenyataan yang dapat diindera. Maka, lebih tepat jika dikatakan sebagai penangkapan fakta, dari pada memindahkan gambaran fakta. Sebab, gambar suatu yang ditangkap adalah pencerapan fakta, bukan sekedar gambarnya".⁸

Definisi di atas menunjukkan bahwa ada empat unsur yang harus ada agar proses berpikir dapat berlangsung yaitu: adanya fakta yang diindera, ada alat

⁷ Departemen P & K, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, hal 683

⁸ Muhammad Ismail, 1933, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, hal. 149

indera, lalu ada otak tempat mencerna fakta yang telah diindera, serta harus ada informasi sebelumnya yang berkaitan dengan benda yang telah diindera tersebut.

Keempat unsur yang telah disebutkan tadi mutlak harus ada, jika salah satu unsur tidak ada maka tidak akan terjadi proses berpikir. Ketika kita berusaha untuk melakukan proses berpikir, tetapi tidak ada fakta atau realitas yang dapat diindera atau informasi sebelumnya tentang fakta yang diindera itu tidak ada, maka yang terjadi adalah proses berkhayal atau berimajinasi yang tidak ada wujudnya. Tentu hal ini bukan merupakan suatu pemikiran. Olehnya itu, proses berpikir akan terjadi ketika ada fakta yang terindera oleh alat indera, ada informasi sebelumnya tentang fakta yang terindera itu, serta ketersediaan otak manusia agar proses berpikir itu dapat terjadi.

Proses berpikir yang telah dijelaskan di atas merupakan proses yang terjadi dalam diri seseorang yang melakukan aktivitas berpikir. Pemikiran yang telah ditemukan oleh si pemikir selanjutnya akan diberikan atau disampaikan kepada khalayak. Pemikiran ini kemudian akan terus berpindah seiring banyaknya orang yang menerima dan kemudian menyampaikan kembali pemikiran tersebut kepada orang lain.

Sementara itu, secara umum politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistim politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistim itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.⁹ Secara spesifik pengertian politik terbagi dalam lima konsep pokok yaitu: negara (*state*),

⁹ Miriam Budiardjo, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 8

kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decisionmaking*), kebijaksanaan (*policy*), pembagian (*distribution*).

Pertama, pemaknaan kata politik dengan menggunakan paradigma negara maka akan disimak konsep negara itu sendiri sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.

Selain itu, ilmuwan politik mengemukakan beberapa definisi politik yang berdasar pada konteks negara seperti Roger F. Soltau dalam *Introduction to Politics*: "Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain". Kemudian, J. Barents dalam Ilmu Politika: "Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara...yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat; ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya"

Kedua, kalangan yang melihat kekuasaan sebagai inti dari politik. Mereka beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo yakni; "kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku."¹⁰

Pemaknaan politik sebagai kekuasaan juga diungkapkan oleh Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam *Power and Society* mengatakan "Ilmu Politik

¹⁰ *Ibid.* Hal 10



mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan." Sedangkan W.A. Robson dalam *The University Teaching Social Sciences*; "Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat,...yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil. Fokus perhatian seorang sarjana ilmu politik... tertuju pada perjuangan untuk mencapai kekuasaan itu."¹¹

Adapun Deliar Noer dalam *Pengantar ke Pemikiran Politik* memaknai politik sebagai;

"Ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru. Di luar bidang hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah pula ada. Hanya dalam zaman modern ini memanglah kekuasaan itu berhubungan erat dengan negara."¹²

Sementara itu, arti politik juga diungkapkan oleh Ossip K. Flechtheim. Menurutnya dalam *Fundamentals of Political Science*: "Ilmu Politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat mempengaruhi negara."¹³

Ketiga, makna politik dalam konsep pengambilan keputusan. Langkah pertama untuk memahami definisi politik dalam konsep pengambilan keputusan adalah dengan terlebih dahulu memaknai keputusan itu sendiri. Keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan pengambilan keputusan

¹¹ *Ibid.*

¹² Deliar Noer, 1983, *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 6

¹³ Miriam Budiardjo, *Op.cit.*, hal 11

lebih menekankan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Kemudian Harold D Laswell mengemukakan definisi politik dalam konsep pengambilan keputusan dengan mengatakan bahwa politik sebagai; "*Who gets, what, when, how*. Atau siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana." ¹⁴

Pemaknaan politik dalam konsep pengambilan keputusan juga dilontarkan oleh Joyce Mitchell. Dia mengemukakan dalam bukunya *Political Analysis and Public Policy* bahwa: "Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya." Sementara Karl W. Deutsch mengemukakan: "Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum" (*Politics is the making of decisions by publics means*).¹⁵ Deutsch lebih menekankan arti politik terutama menyangkut kegiatan pemerintah yang ia ibaratkan negara sebagai kapal, sementara pemerintah adalah nahkodanya.

Keempat, Sebelum mengemukakan pendapat dari beberapa sarjana ilmu politik tentang arti politik dalam konsep kebijaksanaan umum, maka ada baiknya untuk memahami makna kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini adalah suatu kelompok keputusan yang diambil oleh seorang atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Arti politik dalam konsep tersebut diungkapkan oleh beberapa ilmuwan politik seperti Hoogerwerf. Dia mengemukakan pendapatnya bahwa: "Obyek dari ilmu politik adalah kebijaksanaan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya." Menurut Hoogerwerf bahwa kebijaksanaan umum yang dimaksud

¹⁴ Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hal 7

¹⁵ *Ibid.* Hal 12

adalah "membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan." Sejalan dengan itu, David Easton menjelaskan: "Ilmu Politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijaksanaan umum" (*study of the making of public policy*).¹⁶

Kelima, makna politik dalam konsep pembagian (*distribution*) dan alokasi (*allocation*), Harold D Laswell dalam bukunya *Who gets What, When and How* mengemukakan: "Politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana."¹⁷ "Mendapatkan apa" berarti mendapatkan nilai-nilai. "Kapan" berarti ukuran pengaruh yang digunakan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan nilai-nilai terbanyak. "Bagaimana" berarti dengan cara apa seseorang mendapatkan nilai-nilai. Adapun pendapat dari ilmuwan lain yakni David Easton dalam bukunya *A Systems Analysis of Political Life* mengatakan "Sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif (berdasarkan kewenangan) untuk dan atas nama masyarakat."

Masih banyak pendefinisian tentang makna politik yang dikemukakan oleh para ilmuwan politik. Makna politik seperti yang diungkapkan oleh C.C. Roclee dalam buku *Pengantar Ilmu Politik* mengemukakan bahwa politik merupakan proses kompleks yang melibatkan sikap warga negara dan kepentingan, kelompok organisasi, kegiatan pemilihan umum, lobi-lobi, baik

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

perumusan, penerapan, dan penafsiran undang-undang.¹⁸ Akan tetapi, pada dasarnya inti dari semua pendapat ilmuwan tersebut lebih menekankan pada aspek kekuasaan dan pengambilan keputusan. Pendefinisian tersebut lebih menekankan pada aspek kelembagaan semata.

Pendefinisian tentang arti politik yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan politik di atas, menunjukkan bahwa pendefinisian tersebut belum dapat dikatakan definisi yang sempurna. Ketika memperhatikan arti dari definisi itu sendiri, maka definisi itu merupakan deskripsi realita yang mempunyai ciri khas, yaitu memiliki sifat menyeluruh dan mencegah. Maksud dari sifat menyeluruh di sini adalah bahwa definisi yang diberikan harus melingkupi semua aspek realita yang dideskripsikan. Sementara itu, maksud dari sifat mencegah adalah mencegah semua aspek yang tidak masuk dalam deskripsi tersebut.¹⁹

Memperhatikan penjelasan tersebut di atas, maka penulis merasa penting untuk mengungkapkan satu lagi definisi politik. Definisi politik yang dimaksud, diungkapkan oleh Taqiuddin An-Nabhani yang memberikan arti politik (siyasah) yakni: "*Ri'aayatu Syu-unil Ummah daakhiliyah Wa Kharijiyan* (memelihara urusan umat baik di dalam maupun di luar negeri)."²⁰

Pendefinisian politik yang diungkapkan oleh Taqiuddin An-Nabhani tersebut lebih menekankan pada aspek fungsional. Suatu pendefinisian yang sering diabaikan oleh para ahli. Oleh karena itu, ketika definisi lebih ditekankan

¹⁸ C.C. Roclee, 1995. *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Raja Grafiika, hal 4

¹⁹ Hafidz Abdurahman, 1998, *Islam Politik dan Spiritual*, Singapura: Lisan Ul-haq, hal 3

²⁰ Taqiuddin An-Nabhani, 2001, *Mafahim Siyasiyah Hizbut Tahrir*, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, hal 3

pada aspek kelembagaan saja, maka kecenderungan yang terjadi adalah menjadikan aktivitas politik itu sebagai ajang perebutan kekuasaan yang berimplikasi memunculkan dua kubu yang saling tarik-menarik. Akibatnya, wajar kalau kemudian muncul adagium bahwa politik itu kotor.

Tentu sangat berbeda jika definisi tidak hanya ditekankan pada aspek kelembagaan saja khususnya aspek kekuasaan. Jika aspek fungsional yang menjadi perhatian utama dalam pendefinisian politik, maka akan tercipta kerjasama di antara unsur-unsur atau komponen dalam sistem politik tersebut. Kerja sama itu digunakan dalam usaha mencapai tujuan-tujuan dari sistem politik.

Makna pemikiran politik sangat penting dalam melakukan eksplorasi terhadap masalah-masalah politik. Hasil dari Penjajakan itu selanjutnya akan menimbulkan usaha untuk memahami apa yang diamati, sehingga lahir kesadaran politik. Menurut Muhammad Ismail bahwa kesadaran politik tidak akan sempurna apabila dalam proses eksplorasi permasalahan tidak melibatkan dua unsur yakni; adanya pandangan yang universal (yang tidak terbatas pada negeri tertentu), dan pandangan tersebut harus bertolak dari sudut pandang yang khas. Sudut pandang ini dari manapun asalnya bisa, bisa merupakan ide-ide tertentu atau ideologi.²¹

Definisi pemikiran politik yang dikemukakan oleh Rachman Zainuddin, yaitu:

"Pemikiran politik adalah bagian dari ilmu politik yang mencoba melakukan pengkajian secara khusus terhadap pemikiran-pemikiran dalam bidang politik mulai jaman kuno sampai pada jaman sekarang ini. Dalam hal-hal tertentu pemikiran politik mempunyai kaitan yang sangat

²¹ Muhammad Ismail, *Op.cit.*, hal 185

erat dengan sejarah dan filsafat politik dan dengan hal-hal yang berhubungan dengan etika, moralitas dan idealisme politik secara umum.”²²

Adapun menurut Dr. Tijani Abd Qadir Hamid bahwa pemikiran politik itu adalah sebagai berikut:

”...Pemikiran politik secara khusus mengkaji segi kekuasaan; bagaimana sampai pada kekuasaan itu (baik secara sukarela maupun dengan paksaan kekuatan)? Bagaimana mengaturnya? Bagaimana hubungan individu dengan kekuasaan itu (apakah muncul, keluar, atau interaksi)? Ia juga mengkaji masalah ”Undang-undang Dasar” yang mengatur hubungan-hubungan keorganisasian antara lembaga-lembaga kekuasaan politik (eksekutif), legislatif dan yudikatif (bentuk negara secara hukum), dan mengkaji segi proses ”saling mempengaruhi” antara lembaga-lembaga kekuasaan yang berkuasa dan aliran-aliran pemikiran yang bergerak di tengah masyarakat (partai, opini umum, perwakilan, dan kepemilikan).”²³

Definisi pemikiran politik yang lain seperti yang dikemukakan oleh Krisna sebagai berikut;

”...Pemikiran tentang yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuan-tujuan dan sistem politik dengan melakukan seleksi antara beberapa pilihan dan menyusun skala prioritas tujuan-tujuan yang dipilih itu. Proses politik di lengkapi oleh kekuasaan (power), kewenangan (authority), yang digunakan untuk menentukan kebijakan umum dan untuk mengatur atau membagi sumber-sumber yang ada melalui cara yang bersifat persuasif maupun koersi (paksaan).”²⁴

²² Rusadi Kartaprawira, 1997, *Pemikiran dan Budaya Politik*, Jakarta: Badan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, hal 16

²³ Tijani Abd Qadir, 2001, *Pemikiran Politik dalam Al-Quran*, Jakarta: Gema Insani, hal 4

²⁴ Rusadi Kartaprawira, Loc.cit., hal 16



Sementara itu, menurut Abdul Aziz Thaba yang memberikan definisi tentang pemikiran politik sebagai berikut:

"Pemikiran politik adalah segala upaya manusia dengan menggunakan akal pikirannya untuk mencapai suatu sistem politik ideal, yaitu system politik yang konstruktif dengan perkembangan dan kebutuhan seluruh masyarakat, ketika manusia dihadapkan pada persoalan-persoalan politik, ia akan berpikir untuk memilih atau menentukan pilihannya atas berbagai alternatif pilihan."²⁵

Pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa pemikiran politik diawali oleh adanya pengkajian atas fenomena politik yang terjadi dan atau yang telah terjadi. Proses itu nantinya akan melahirkan konsep pemikiran politik alternatif yang bisa menyelesaikan problem sosial politik yang terjadi. Olehnya itu, ada kalanya pemikiran politik lahir dalam upaya pembenahan dan perbaikan atau menawarkan suatu bentuk pemikiran baru.

B. Pemikiran Politik H.M. Jusuf Kalla

Untuk menjelaskan pemikiran politik H.M. Jusuf Kalla secara mendalam, maka terlebih dahulu akan dipaparkan tentang riwayat hidup dan hal-hal yang mempengaruhi pemikiran politiknya.

1. Riwayat Hidup H.M. Jusuf Kalla

Muhammad Jusuf Kalla lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942. Panggilan akrabnya adalah Ucu' seperti halnya panggilan untuk semua lelaki Bugis yang bernama Jusuf. Ia menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1967 dan The

²⁵ Abd Aziz Thaba, 2000, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jatim: Al-Izzah, hal 84

European Institute of Business Administration Fountainebleu, Prancis (1977). Pada Oktober 2004 menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. SBY dilantik sebagai Presiden RI ke-6 dan H.M. Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden RI ke-10. Pasangan ini menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama kali dipilih rakyat secara langsung.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, H.M. Jusuf Kalla dipercayakan selama kurang dari setahun (1999-2000) sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI merangkap Kepala Bulog. Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004) ia dipilih menduduki jabatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. H.M. Jusuf Kalla kemudian mengundurkan diri sebagai Menko Kesra RI sebelum maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain tugas-tugas sebagai Menko Kesra, H.M. Jusuf Kalla telah meletakkan kerangka perdamaian di daerah konflik Poso, Sulawesi Tengah. Beliau juga melakukan hal yang sama di Ambon, Maluku. Lewat pertemuan Malino I dan Malino II beliau berhasil meredakan dan menyelesaikan konflik di antara komunitas Kristen dan Muslim.

Kunjungan kerjanya sebagai Menko Kesra ke Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada awal tahun 2004 memberinya inspirasi untuk menerapkan pengalaman penyelesaian konflik Ambon-Poso di NAD. Upaya penyelesaian Aceh didalami dan dilanjutkan penanganannya saat setelah dilantik menjadi Wakil Presiden RI. Akhirnya, kesepakatan perdamaian untuk NAD antara Pemerintah dan tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berhasil

ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Pengalaman pada organisasi pemuda/mahasiswa seperti Ketua HMI Cabang Makassar tahun 1965-1966, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) 1965-1966, serta Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tahun 1967-1969 memberi bekal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sulit tersebut.

Tahun 1965 sesaat setelah pembentukan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), H.M. Jusuf Kalla terpilih menjadi Ketua Pemuda Sekber Golkar Sulawesi Selatan dan Tenggara (1965-1968). Kemudian, terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 1965-1968 mewakili Sekber Golkar. Pada Musyawarah Nasional (Munas) Golkar di Bali, bulan Desember 2004 ia terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar Periode 2004-2009. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Anggota Dewan Penasihat DPP Golkar, dan menjadi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Utusan Golkar (1982-1987), serta Anggota MPR-RI Utusan Daerah (1997-1999). Putra pasangan Hadji Kalla dan Hajjah Athirah ini sebelum terjun ke pemerintahan dikenal luas oleh dunia usaha sebagai pengusaha sukses. Usaha-usaha yang dirintis ayahnya, NV. Hadji Kalla, diserahkan kepemimpinannya sesaat setelah ia diwisuda menjadi Sarjana Ekonomi di Universitas Hasanuddin Makassar Akhir Tahun 1967. Di samping menjadi Managing Director NV. Hadji Kalla, juga menjadi Direktur Utama PT Bumi Karsa dan PT Bukaka Teknik Utama.

Usaha yang digelutinya, di samping usaha lama, ekspor hasil bumi, dikembangkan usaha yang penuh idealisme, yakni pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi guna mendorong produktivitas masyarakat pertanian. Anak perusahaan NV. Hadji Kalla antara lain; PT Bumi Karsa (bidang konstruksi) dikenal sebagai kontraktor pembangunan jalan raya trans Sulawesi, irigasi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, jembatan-jembatan, dan lain-lain. PT Bukaka Teknik Utama didirikan untuk rekayasa industri dan dikenal sebagai pelopor pabrik Aspal Mixing Plant (AMP) dan gangway (garbarata) di Bandara, dan sejumlah anak perusahaan di bidang perumahan (real estate); transportasi, agrobisnis dan agroindustri.

Atas prestasinya di dunia usaha, Jusuf Kalla dipilih oleh dunia usaha menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan (1985-1997). Beliau juga diangkat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia (1997-2002). Beliau juga dipercayakan untuk menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Sulawesi Selatan (1985-1995). Selain itu, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua ISEI Pusat (1987-2000) dan Penasihat ISEI Pusat (2000-sekarang).

Di bidang pendidikan, Jusuf Kalla menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Hadji Kalla yang mewadahi TK, SD, SLTP, SLTA Athirah. Beliau juga sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ghazali, Universitas Islam Makassar. Selain itu, ia menjabat Ketua Dewan Penyantun (Trustee) pada beberapa universitas, seperti Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar; Institut Pertanian Bogor (IPB); Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar; Universitas Negeri Makassar (UNM).

Beliau juga menjadi Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina dan Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UNHAS.

Di kalangan ulama dan pemuka masyarakat, nama Jusuf Kalla dikenal sebagai Mustasyar Nahdhatul Ulama Wilayah Sulawesi Selatan. Beliau melanjutkan tugas-tugas dan tanggung jawab ayahnya (Hadji Kalla) yang sepanjang hidupnya menjadi bendahara NU Sulsel juga menjadi bendahara Masjid Raya. Masjid Besar dan bersejarah di Makassar. Ketika akan membangun masjid bersama Alm. Jenderal M. Jusuf, Jusuf Kalla dipilih menjadi Ketua Yayasan Badan Wakaf Masjid Al-Markaz al-Islami (Masjid Jend. M. Jusuf). Sekarang, Masjid tersebut menjadi Masjid termegah di Indonesia Timur. Di kalangan agama-agama lain selain Islam, Jusuf Kalla dipilih menjadi Ketua Forum Antar-Agama Sulsel.

Penggemar olah raga golf ini, selama sepuluh tahun (1980-1990) menjadi Ketua Persatuan Sepak Bola Makassar (PSM). Beliau juga merupakan pemilik Club Sepak Bola Makassar Utama (MU) tahun 1985-1992. H. M. Jusuf Kalla yang menikah dengan Nyonya Hajjah Mufidah Jusuf telah dikaruniai satu putra yakni Solichin Jusuf dan empat putri yakni Muchlisa Jusuf, Muswirah Jusuf, Imelda Jusuf, Chaerani Jusuf, serta dikaruniai sepuluh orang cucu.

Selain tugas rutin, Wakil Presiden Republik Indonesia juga melaksanakan program-program strategis pemerintah Indonesia. Program tersebut meliputi: revitalisasi pertanian dan kehutanan, pertanian; peningkatan kinerja industri dalam negeri dengan membangun industri listrik, dan industri pertahanan, energi

dan sumber daya mineral; pekerjaan umum dengan percepatan pembangunan jalan tol Trans-Jawa, jalan di luar Jawa serta proyek pengairan skala menengah.

Program strategis Wakil Presiden Republik Indonesia juga mencakup: percepatan pembangunan bandara udara, pelabuhan dan kereta api; perdagangan dengan peningkatan ekspor; kelautan untuk peningkatan produksi perikanan; tenagakerja dengan penyelesaian masalah perburuhan; perumahan dengan membangun rumah susun; pariwisata dengan peningkatan; bidang BUMN dengan peningkatan kinerja BUMN; bidang Usaha Kecil Menengah dengan menghidupkan kembali sistem jaminan untuk kredit kecil; dan bidang penanaman modal dengan menyusun program perbaikan *Doing Business*²⁶.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemikiran

Berdasarkan pandangan beberapa ahli bahwa kepribadian seorang tokoh dapat terbentuk, dipertahankan, dan mengalami perubahan ketika terjadi proses sosialisasi. Untuk itu, ada tiga faktor utama yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter atau kepribadian seseorang yaitu: *Pertama*, faktor lingkungan sosial yakni berkaitan dengan tingkat sosialisasi individu dalam pergaulannya dengan anggota masyarakat lainnya. Lingkungan sosial sangat mempengaruhi pikiran seseorang. Misalnya, ketika seorang pendiam atau pemalu berteman dengan seorang yang aktif dan lincah, maka seiring dengan berjalannya waktu seorang yang pendiam akan terpengaruh untuk ikut aktif dan lincah.

²⁶ <http://www.setwapres.go.id/xhtml/biografi/wapres>



Kedua, faktor budaya yaitu secara normatif manusia diharapkan pada pilihan-pilihan pranata kebudayaan yang spesifik, langsung atau tidak langsung akan bermuara pada pemetaan individu berdasarkan karakteristik dan spesifikasi sistim nilai budaya yang berlaku. Misalnya, orang suku Bugis-Makassar cenderung bersifat keras, kuat, dan tegas. Hal ini berbeda dengan orang suku Jawa khususnya Sunda yang cenderung lembut.

Ketiga, faktor pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan memberi pengaruh bagi pemikiran dan tingkah laku seseorang. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pendidikan formal di sekolah, melainkan termasuk dalam hal ini pendidikan non-formal seperti pendidikan yang didapatkan di dalam rumah (keluarga) maupun pendidikan agama di mesjid atau lembaga keagamaan. Misalnya, seorang yang beraga Islam akan tetapi didik dengan pikiran-pikiran sekuler maka cenderung orang tersebut akan berpikir dan bertingkah laku sekuler.²⁷

3. Pemikiran Politik H.M. Jusuf Kalla

Mengingat begitu banyak dan luasnya pemikiran politik H.M. Jusuf Kalla, maka penulis membatasi pemikiran politik itu hanya pada pemikirannya tentang konflik dan pemikiran ekonomi politiknya tentang BLT. Pemikiran politiknya tentang konflik menarik untuk dikaji mengingat banyaknya daerah-daerah yang berkonflik. Konflik tersebut tidak hanya bernuansa SARA (suku, agama, dan ras)

²⁷Tubbs. S.L & Sylvia Moss, 1996, *Human Communication Prinsip-Prinsip Dasar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

tetapi juga menyangkut politik dan ekonomi. Bahkan, tidak jarang konflik yang terjadi menimbulkan gerakan-gerakan separatis yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut H.M. Jusuf Kalla, masalah-masalah yang terjadi di Aceh, Papua, Ambon, Poso dan keterlibatan anak-anak muda Indonesia dalam aksi bom bunuh diri adalah akibat ketidakadilan. Ketidakadilan itu dalam hal ekonomi yaitu menyangkut kesejahteraan.

"Orang tidak akan mungkin berontak kalau tingkat kesejahteraannya terjamin. Orang berontak karena tingkat kesejahteraan tidak merata. Karena itu, kunci menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut adalah menciptakan keadilan ekonomi dalam arti kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia harus sungguh-sungguh terwujud. Kalau kita bisa menciptakan itu, maka masalah seperti di Aceh bisa selesai dengan cepat"²⁸

Pemikiran politik H.M. Jusuf Kalla sebenarnya cukup sederhana untuk dipahami tetapi begitu mendalam. Menurutnya, ketika ingin melihat Indonesia maju dan bangkit maka gejolak di dalam negeri harus diminimalkan. Perekonomian tidak akan berkembang jika keamanan dalam negeri tidak stabil. Jika keamanan dalam negeri tidak menjamin maka investor tidak berani masuk menanamkan investasinya ke Indonesia dan bahkan investor yang sudah ada pun akan menarik kembali investasinya dan menanamkannya di luar negeri. Jika tidak ada investor maka tidak ada pabrik-pabrik baru, tidak ada pembangunan gedung-gedung megah, tidak ada proyek jembatan, pelabuhan, bandara atau proyek-proyek lainnya. Jika tidak ada investasi berarti lapangan pekerjaan juga sedikit.

²⁸ Ahmad Shahab, *Op.cit.*, hal 3

Lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pertumbuhan angkatan kerja sehingga terjadilah pengangguran dan pemutusan hak kerja (PHK). Pendapatan yang tidak bertambah sementara kebutuhan meningkat menyebabkan masyarakat miskin bertambah. Olehnya itu, agar kemiskinan berkurang maka lapangan kerja harus dibuka seluas-luasnya. Salah satu jalan untuk membuka lapangan pekerjaan adalah dengan investasi. Sementara bagi investor untuk menanamkan investasinya di suatu daerah mutlak mengharuskan kondisi daerah tersebut harus aman dan stabil.

Menurut H.M. Jusuf Kalla bahwa Indonesia dilanda berbagai persoalan. Tetapi persoalan itu bertahun-tahun tidak dapat diselesaikan karena pemerintah tidak fokus dan tidak berusaha memotong satu mata rantai dari persoalan tersebut. Baginya, persoalan mendasar yang segera harus diatasi adalah penyelesaian konflik di daerah-daerah. Konflik yang terjadi menyebabkan keamanan tidak stabil. Tidak stabilnya keamanan, selain menyebabkan investasi tidak masuk juga menjadikan masyarakat tidak bekerja. Masyarakat menjadi takut turun ke sawah, takut berkebun, bahkan meninggalkan daerahnya yang subur untuk menyelamatkan nyawanya.

Ketika masyarakat tidak lagi bekerja maka tidak ada pendapatan. Perekonomian juga tidak berjalan karena peredaran uang, barang, dan jasa juga terhenti. Hal ini disebabkan oleh kondisi yang kacau oleh konflik. Olehnya itu, agar ini dapat kembali berjalan normal maka menghentikan konflik adalah solusi satu-satunya.

C. Teori Konflik

Konflik merupakan pertentangan atau perbedaan pendapat antara paling tidak dua orang atau kelompok. Konflik seperti ini dinamakan konflik lisan atau konflik non-fisik. Bila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan, ia dapat meningkat menjadi konflik fisik, yakni dilibatkannya benda-benda fisik dalam perbedaan pendapat²⁹. Konflik juga dapat diartikan sebagai pertentangan yang terbuka antara kekuatan-kekuatan politik (kelompok atau individu) yang memiliki atau yang merasa memiliki sarana-sarana yang tidak sejalan³⁰.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan atau pertentangan. Perbedaan tersebut baik yang disebabkan oleh individu maupun kelompok yang masing-masing memiliki kepentingan yang tidak sejalan. Menurut Maurice Duverger, salah satu penyebab terjadinya konflik adalah hal-hal yang terjadi pada tingkat individual³¹.

Melihat pihak yang terlibat dalam konflik, Maswadi Rauf membagi konflik menjadi dua:

"*Pertama*, konflik individual, yakni konflik yang terjadi antara dua orang yang tidak melibatkan kelompok masing-masing. Faktor penyebab konflik adalah masalah pribadi sehingga yang terlibat dalam konflik hanyalah orang-orang bersangkutan saja. Contoh dari konflik individual adalah perkelahian antara dua orang yang disebabkan oleh ketersinggungan salah satu pihak. *Kedua*, konflik kelompok, yakni konflik yang terjadi antara dua kelompok atau lebih. Konflik pribadi dengan mudah berubah menjadi konflik kelompok karena adanya kecenderungan yang besar dari individu-individu yang berkonflik untuk melibatkan kelompoknya masing-masing. Di samping itu, anggota-

²⁹ Maswadi Rauf, 2000, *Konsensus Politik, Sebuah Peninjauan Teoritis*, Jakarta: LIP Fisip UI kerjasama dengan Mizan, hal 2

³⁰ S.N. Kartikasari, (*penyunting*), 2000, *Mengelola Konflik Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*, Jakarta: The British Council, hal 4

³¹ Maurice Duverger, 1987, *Sosiologi Politik*, Jakarta: Rajawali Press, hal 174-175



anggota kelompok mempunyai solidaritas yang tinggi sehingga juga ada kecenderungan anggota-anggota kelompok untuk membantu seorang anggota yang terlibat konflik tanpa ingin tahu sebab-sebab yang menimbulkan konflik.³²

Terjadinya konflik disebabkan adanya kegiatan yang dilakukan anggota masyarakat dalam memperebutkan sumber-sumber, posisi atau kedudukan atau jabatan yang dianggap langka dalam masyarakat. Penyebab lain adalah kecenderungan manusia untuk menguasai orang lain. Kecenderungan manusia untuk berkuasa menjadi salah satu penyebab konflik.³³

Berbagai pernyataan tentang konflik menunjukkan bahwa konflik senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat. Segala aktivitas atau interaksi sosial yang dilakukan oleh warga masyarakat tidak lepas dari konflik. Namun demikian, dalam interaksi antar warga masyarakat juga terjadi kesepakatan atau kerjasama yang sering disebut dengan konsensus.

Istilah konflik dalam ilmu politik sering kali dikaitkan dengan kekerasan. Kekerasan itu seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik juga mengandung makna benturan, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu dan individu, kelompok dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah.³⁴

Konflik yang mengandung kekerasan, pada umumnya terjadi dalam negara yang belum memiliki konsensus dasar mengenai dasar dan tujuan negara serta mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang

³² Maswadi Rauf, *Op. cit.*, hal 6

³³ *Ibid.* hal 6-7

³⁴ Ramlan Surbakti, *Op.cit.*, hal 149

melembaga. Sementara konflik yang tidak berwujud kekerasan pada umumnya dapat ditemukan dalam masyarakat negara yang memiliki konsensus mengenai dasar negara dan tujuan negara serta mengenai mekanisme pengaturan konflik yang melembaga. Contohnya seperti unjuk rasa (demonstrasi), pemogokan, dialog, pembangkangan sipil, dan polemik melalui media massa.

Konflik juga tidak selalu bersifat negatif. Apabila ditelaah secara saksama, konflik mempunyai fungsi positif yakni sebagai pengintegrsi masyarakat dan sebagai sumber perubahan. Tidak semua konflik juga berimplikasi politik sehingga pengaturannya tidak selalu melalui proses politik. Ketidaksepakatan yang terjadi antara dua orang sering kali dapat diselesaikan dengan kedua orang tersebut, atau dengan bantuan pihak ketiga tanpa melibatkan lembaga-lembaga pemerintah. Akan tetapi, apabila pertentangan itu sulit untuk diselesaikan oleh pihak-pihak yang berkonflik maka permasalahan tersebut dibawa ke lembaga pengadilan. Apabila mereka tidak mampu mencapai kesepakatan maka pemerintah turun tangan sebagai mediator atau arbitrator. Kasus ini pada mulanya bukan konflik politik, tetapi berkembang menjadi konflik politik karena pihak yang berkonflik meminta pemerintah membuat keputusan yang adil atau karena pemerintah menganggap konflik itu harus segera diselesaikan karena dapat mengganggu kepentingan umum.³⁵

1. Sumber Konflik

Pada dasarnya konflik terjadi karena dua hal, yakni karena kemajemukan horisintal dan kemajemukan vertikal. Kemajemukan horisontal merupakan

³⁵ *Ibid.* Hal 151

kemajemukan karena struktur masyarakat yang majemuk secara kultural seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras. Kemajemukan secara sosial seperti perbedaan pekerjaan dan profesi misalnya petani, buruh, pengusaha, pegawai negeri sipil, wartawan, militer, dokter, cendekiawan.

Kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menyebabkan konflik karena sebagian besar masyarakat yang hanya memiliki sedikit kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang mendominasi ketiga sumber pengaruh tersebut.

2. Tujuan Konflik

Pada umumnya ada dua tujuan dasar setiap konflik, yaitu untuk mendapatkan dan atau mempertahankan sumber-sumber³⁶. Pertama, tujuan konflik untuk memperoleh sumber-sumber merupakan ciri manusia yang hidup bermasyarakat. Hal itu muncul karena manusia memerlukan sumber-sumber tertentu yang bersifat materiil maupun spiritual.

Kedua, tujuan konflik untuk mempertahankan sumber-sumber yang selama ini sudah dimiliki juga merupakan kecenderungan hidup manusia. Manusia ingin memelihara sumber-sumber yang menjadi miliknya. Mereka juga berupaya mempertahankannya dari usaha pihak lain untuk merebut atau mengurangi sumber-sumber tersebut.

³⁶ *Ibid.* Hal 155-156

Perbedaan tujuan konflik ini adalah perbedaan yang bersifat analitis karena dalam kenyataan jarang terjadi konflik yang hanya bertujuan mendapatkan atau mempertahankan saja, melainkan sering terjadi berupa perpaduan keduanya. Selain berupaya mendapatkan juga berupaya untuk mempertahankan. Oleh karena itu, dalam setiap kasus konflik yang diperhitungkan adalah untung dan rugi. Artinya, setiap pihak berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin sumber-sumber tetapi dengan kerugian yang sekecil mungkin.

3. Prinsip Pemecahan Konflik

Menurut Fisher bahwa setidaknya ada tiga prinsip dalam metode pemecahan konflik yakni³⁷; *pertama*, pisahkan orang dari masalah. Para perunding (negosiator) perlu untuk berurusan langsung dengan orang-orang dalam suatu perselisihan sehingga hubungan dan masalah dapat dipisahkan. Selain berusaha mempersepsi orang lain secara akurat, kedua pihak harus menyatakan emosi mereka dan mengakuinya secara sah.

Kedua, pusatkan pada kepentingan dan bukan pada pendapat. Fisher menganjurkan untuk memfokuskan pembicaraan pada kepentingan ketimbang pendapat. Bila perunding mempermasalahkan pendapat, maka mereka cenderung mempersulit diri mereka sendiri. *Ketiga*, temukan pilihan demi keuntungan bersama. Kendala utama untuk memperoleh alternatif-alternatif yang baik adalah

³⁷ Stewar L. Tubbs & Sylvia Moss, 1996, *Human Communication Prinsip-Prinsip Dasar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal 224.

karena membuat penilaian yang terburu-buru dan mencari jawaban tunggal untuk mengatasi perselisihan.

Sementara menurut Dahrendorf, pengaturan konflik yang efektif sangat bergantung pada tiga faktor³⁸. *Pertama*, kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi di antara mereka (adanya pengakuan pada adanya kepentingan yang diperjuangkan oleh pihak yang lain). *Kedua*, kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasi secara rapi, tidak bercerai-berai, dan *terkotak-kotak* sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain. *Ketiga*, kedua pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan dan interaksi di antara mereka. Ketika ketiga syarat dipenuhi maka berbagai bentuk pengaturan konflik dapat dibuat dan dilaksanakan.

Terdapat juga tiga bentuk pengaturan konflik, yakni: *pertama*, bentuk konsiliasi seperti dalam parlemen dimana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka dan mendalam untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak. Kebanyakan konflik politik disalurkan dan diatur dengan bentuk konsiliasi. *Kedua*, bentuk mediasi yakni kedua pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga (seorang mediator berupa ahli, tokoh, atau lembaga tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam mengenai hal yang dipertentangkan), tetapi nasihat yang diberikan oleh mediator ini tidak mengikat mereka. *Ketiga*, bentuk arbitrase yakni kedua pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir yang sifatnya

³⁸ Ramlan Surbakti, *Op.cit.*, hal 160-163

legal sebagai jalan keluar konflik pada pihak ketiga sebagai arbitrator. Pengadilan atau lembaga-lembaga arbitrase lainnya dapat dipilih sebagai arbitrator. Ketiga bentuk pengaturan konflik ini dapat dilaksanakan satu saja atau ketiga-tiganya secara bertahap.

Menurut Eric Nodlinger ada enam cara pengaturan konflik yang pernah diterapkan, yaitu:³⁹

Pertama, koalisi pemerintahan yang stabil di antara partai-partai politik. Koalisi ini akan melibatkan organisasi-organisasi utama yang sedang berkonflik. Koalisi biasanya dilakukan sebelum pemilihan umum diselenggarakan. *Kedua*, penerapan prinsip proporsionalitas yakni posisi-posisi pemerintahan yang terpenting didistribusikan kepada golongan-golongan masyarakat sesuai dengan porsi jumlahnya dalam keseluruhan penduduk.

Ketiga, penerapan sistem saling veto yakni suatu keputusan tidak akan dapat diambil tanpa disetujui oleh semua pihak yang berkonflik. Hal ini dapat meliputi semua bidang pemerintahan. *Keempat*, para pemimpin kelompok yang berkonflik sepakat untuk tidak melibatkan pemerintah dalam bidang-bidang kebijakan umum yang mempengaruhi nilai-nilai dan kepentingan berbagai kelompok yang berkonflik

Kelima, semua pihak yang berkonflik bersedia saling menyesuaikan diri dengan kepentingan dan nilai pihak lain. Selanjutnya yang *keenam*, cara konsesi. Berbeda dengan kompromi yang mengharuskan semua pihak yang berkonflik untuk saling menyesuaikan dengan kepentingan pihak lain, dalam konsesi hanya

³⁹ *Ibid*,

satu kelompok yang memberikan konsesi. Hal ini dapat berupa kelompok yang terkuat memberi konsesi pada kelompok yang lemah

D. Kerangka Pikir

Sesuai dengan judul skripsi penulis yaitu Pemikiran Politik Muhammad Jusuf Kalla, maka tema sentral yang penulis kaji dalam penulisan skripsi ini adalah pemikiran politik Muhammad Jusuf Kalla. Pemikiran politiknya tentang konflik dan pemikiran ekonomi politiknya tentang BLT. Pemikiran tersebut akan dihubungkan dengan kondisi sosial-budaya dan pendidikan karena kondisi tersebut sangat menentukan karakter berpikir H.M. Jusuf Kalla sebagai seorang saudagar ataupun sebagai seorang negarawan.

Pemikiran politik merupakan suatu proses berpikir yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai sistem politik yang ideal. Pemikiran politik merupakan bidang yang sangat menarik dalam bidang ilmu politik. Mempelajari pemikiran politik seorang tokoh/ilmuwan politik tidak saja membawa pemahaman seorang pemikir terhadap sesuatu masalah politik yang menjadi pusat perhatiannya, tetapi juga terkadang dihadapkan pada perdebatan antara pemikir. Untuk menentukan apakah pemikiran itu bersifat politis atau tidak yakni dengan melihat manifestasinya, yaitu pada sikap, tanggapan, ucapan, tulisan, dan perilakunya

H.M. Jusuf Kalla merupakan seorang pemikir politik. Ada banyak pemikiran politik H.M. Jusuf Kalla. Akan tetapi, dalam skripsi ini penulis membatasinya. Pemikiran politiknya yang menarik untuk dikaji adalah tentang konflik. Pemikirannya tentang konflik menarik untuk diteliti mengingat banyaknya daerah di Indonesia yang

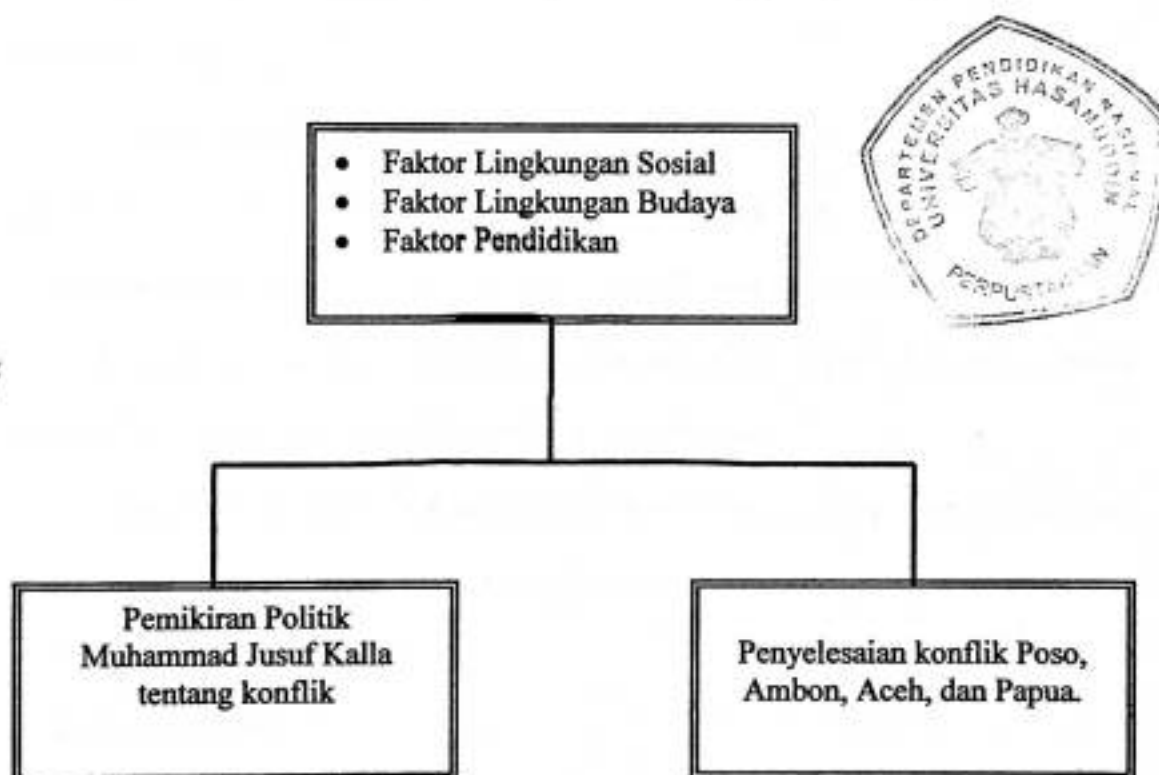
sedang berkonflik. Ada daerah yang sudah berkonflik puluhan tahun lamanya seperti di Ambon dan Aceh yang tak kunjung selesai.

Pemikiran politik H.M. Jusuf Kalla tentang konflik sebenarnya cukup sederhana untuk dipahami tetapi begitu mendalam maknanya. Beliau mengatakan bahwa ketika ingin melihat Indonesia maju dan bangkit maka gejolak di dalam negeri harus diminimalkan. Perekonomian tidak akan berkembang jika keamanan dalam negeri tidak stabil. Jika keamanan dalam negeri tidak menjamin maka investor tidak berani masuk menanamkan investasinya ke Indonesia dan bahkan investor yang sudah ada pun akan menarik kembali investasinya dan menanamkannya di luar negeri. Jika tidak ada investor maka tidak ada pabrik-pabrik baru, tidak ada pembangunan gedung-gedung megah, tidak ada proyek jembatan, pelabuhan, bandara atau proyek-proyek lainnya. Jika tidak ada investasi berarti lapangan pekerjaan juga sedikit. Olehnya itu, solusi untuk mengatasi semua itu adalah dengan menyelesaikan konflik yang terjadi.

Pemikiran politik H.M. Jusuf Kalla yang juga menarik untuk diteliti yakni pemikiran ekonomi politiknya. Mengingat pemikirannya dalam bidang itu luas sekali, maka penulis membatasi hanya pada pemikiran ekonomi politiknya tentang BLT. Hal itu menjadi menarik mengingat ide BLT tersebut masih diterapkan hingga sekarang. Selain itu, pemikirannya tentang BLT mendapat tanggapan dan bahkan penolakan dari berbagai kalangan khususnya mahasiswa dan pengamat ekonomi.

E. Skema Kerangka Pikir

Memperhatikan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka pada bagian ini akan diuraikan hal-hal yang dijadikan penulis sebagai landasan berpikir. Landasan berpikir ini akan mengarahkan penulis dalam mengumpulkan data dan informasi, guna menyelesaikan masalah yang telah dipaparkan. Adapun skema kerangka berpikir yang dijadikan pegangan dalam penelitian ini seperti pada bagan berikut :



Skema kerangka pikir.

BAB III

METODE PENELITIAN



Dalam Bab ini akan diuraikan empat sub-pokok bahasan, yaitu tentang metode penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Metode ini lebih menekankan pada analisa dan pemaknaan kata karena menyangkut pemikiran tokoh. Menurut Bogdan dan Taylor⁴⁰ metode kualitatif adalah suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Sementara deskriptif⁴¹ dapat digunakan untuk mendeskripsikan objek-objek, kasus-kasus dan situasi-situasi dengan teliti, merangkai kenyataan menjadi sutau cerita (*narration*).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *life history*. *Life history*⁴² dalam ilmu sosial digunakan sebagai pendekatan untuk melihat bagaimana reaksi, tanggapan, interpretasi, pandangan dari dalam terhadap sesuatu. Dengan menggunakan pendekatan seperti ini, seorang peneliti akan memperdalam pengertiannya secara

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 1998, hal 4

⁴¹ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gaja Mada Uni Press, Yogya, 1992, hal 78

⁴² Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal 114

kualitatif mengenai detail persoalan yang sedang dipelajari dalam hal ini adalah pemikiran seorang tokoh dan faktor-faktor yang mempengaruhi pikiran politiknya dalam hal ini Muhammad Jusuf Kalla. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptis analisis.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dan informasi pada penelitian ini, pada awalnya penulis merencanakan untuk mendapatkannya melalui wawancara langsung tidak terstruktur dengan nara sumber dalam hal ini H.M. Jusuf Kalla. Akan tetapi, berhubung objek penelitian memiliki keterbatasan waktu dan kesibukan yang padat (sebagai Wapres, ketua umum partai, sekaligus calon presiden) maka penulis mencari data dan informasi melalui orang-orang terdekatnya. Penulis juga tetap melakukan studi pustaka dari berbagai sumber tertulis seperti buku, majalah, makalah, surat kabar, jurnal berita, internet, dan catatan-catatan lainnya yang berisi pemikiran politik H.M. Jusuf Kalla.

Orang-orang terdekat H.M. Jusuf Kalla penulis wawancarai secara mendalam dan tidak terstruktur. Hal tersebut sengaja penulis pilih. Alasannya karena dalam penelitian yang menyangkut pemikiran seseorang, peneliti harus mengikuti alur pikir dan kondisi atau keberadaan nara sumber. Cara seperti itu untuk mengantisipasi sikap nara sumber yang terkadang tidak ingin memaparkan apa yang akan diteliti oleh peneliti.

D. Metode Analisis Data

Langkah yang pertama dilakukan dalam tulisan ini adalah mengumpulkan data-data yang relevan dengan tema yang diambil, yaitu dengan melakukan wawancara

langsung. Selain itu, data dan informasi juga dikumpulkan melalui hasil pengkajian dari literatur pendukung atau data sekunder. Data-data yang telah terkumpul kemudian dikoreksi dan diseleksi untuk mendapatkan data yang benar-benar relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Selanjutnya, data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

BAB IV

PEMBAHASAN



H.M. Jusuf Kalla mengatakan bahwa pada dasarnya manusia memiliki dua sifat pokok. Sifat tersebut adalah sifat manusiawi dan sifat binatang. Sifat manusiawi yaitu manusia memiliki rasa kecintaan untuk saling menghormati, menghargai, keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan menyukai keadaan yang teratur dan damai. Sementara sifat binatang ditandai oleh sikap manusia yang cenderung melakukan kerusakan. Kerusakan itu diawali dengan munculnya nafsu kebinatangan dalam diri manusia seperti keinginan untuk membunuh, merampok, dan memperkosa. Kalau sifat pertama (sifat manusiawi) yang menonjol dalam diri seseorang dan masyarakat dimana mereka berinteraksi, maka kehidupan akan menjadi aman dan tenteram. Akan tetapi kalau sifat yang kedua (sifat kebinatangan) yang mendominasi individu dalam masyarakat, maka yang berkembang dalam masyarakat adalah suasana kacau atau konflik.

Kondisi yang mendorong munculnya sifat pertama (sifat manusiawi) karena pada dasarnya manusia itu lahir sebagai konsekuensi dari cinta kasih bapak dan ibunya. Karena itu, kelahiran cabang bayi di muka bumi pada dasarnya juga telah melahirkan cinta kasih sebagai asal usul dari kelahirannya. Jadi dengan demikian, manusia secara alamiah menghendaki cinta kasih itu tersebar di antara sesama manusia dalam mengarungi kehidupannya. Hubungan sosial yang dilandasi cinta kasih yang tulus seperti inilah yang kemudian melahirkan perdamaian yang lebih

hakiki. Berangkat dari fenomena itu, maka pada dasarnya manusia memang menginginkan hidup dalam suasana yang damai, aman, tenteram, dan penuh rasa saling menghargai dan menghormati.

Sementara itu, munculnya sifat yang kedua (sifat kebinatangan) dipicu oleh hubungan yang tidak dilandasi dengan sikap saling menghormati dan menghargai di antara anggota masyarakat. Kalau terjadi konflik dalam masyarakat berarti telah terjadi deviasi dari dasar hubungan yang terjadi antara sesama manusia. Hubungan sosial yang alami adalah interaksi yang terjadi antara anggota masyarakat secara sukarela, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan. Jika dalam interaksi itu telah menyimpang dari kodrat alamiahnya sebagai manusia, maka akan melahirkan nafsu atau emosi bagi orang yang telah dirugikan tersebut. Akibat dari hubungan itu dapat memicu rasa benci dan keinginan untuk saling berkonflik.

Ketika konflik terjadi secara terus-menerus dan keadaan masyarakat menjadi kacau, maka potensi sifat manusiawi akan kembali muncul. Individu atau anggota masyarakat yang merasakan penderitaan dan ketidaknyamanan atas kondisi konflik yang terjadi akan mendorongnya untuk berusaha keluar dari keadaan tersebut. Sifat kebinatangan yang awalnya mendominasi mereka, perlahan-lahan akan semakin berkurang. Hal itu disebabkan oleh sifat manusiawi atau keinginan mereka untuk hidup rukun dan damai seperti sedia kala lebih besar daripada keinginan untuk hidup dalam kondisi yang penuh penderitaan dan ketakutan.

Seseorang yang lahir karena cinta kasih kemudian dirawat dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang serta dalam kehidupannya khususnya dalam keluarga ia mendapatkan didikan yang baik, maka ia pun akan tumbuh dan berkembang menjadi

seorang yang baik dan cinta kedamaian. Ia akan senantiasa berpikir dan melakukan perbuatan yang mengarah pada perdamaian. Potensi sikap penyayang dan cinta kedamaian yang telah melekat dalam dirinya akan terus ada dan muncul ketika ada rangsangan berupa fenomena. Fenomena itu akan direspon sebagai reaksi atas adanya perbedaan pandangan. Misalnya ketika ia melihat adanya perselisihan maka naluri kasih sayang akan mendorong menyelesaikan perselisihan tersebut meskipun ia bukan merupakan bagian dari pihak yang berselisih.

H.M. Jusuf Kalla adalah salah seorang di antara yang memiliki pemikiran seperti itu. Ia tidak pernah mau melihat orang atau kelompok berselisih apalagi konflik yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik. Ketika ia dihadapkan pada situasi konflik, maka dengan cepat ia akan mengambil sikap dan langkah strategis untuk menyelesaikan dan mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik tersebut. Walaupun hal itu bukan merupakan bagian dari tugasnya maupun bagian darinya.

Kasus-kasus konflik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia telah ia respon. Konflik-konflik besar yang telah terjadi puluhan tahun dan telah ditangani oleh beberapa pihak berwenang yang belum terselesaikan, dapat ia damaikan dengan baik hingga saat ini. Pemikiran dan strateginya untuk menyelesaikan konflik-konflik seperti yang terjadi di Poso, Ambon, Aceh, dan Papua akan dikaji lebih mendalam pada skripsi ini.



A. Konflik Poso

Sebelum membahas pemikiran H.M. Jusuf Kalla tentang konflik Poso, maka terlebih dahulu disajikan latar belakang konflik dan deklarasi Malino. Kedua aspek ini akan diuraikan lebih lanjut.

1. Latar Belakang Konflik

Kabupaten Poso tergolong berpenduduk sangat heterogen. Sebelum konflik terjadi, aneka etnis maupun agama hidup rukun dalam harmoni sosial yang sangat terjaga. Meskipun suku Pamona sebagai penduduk pribumi Poso dan mendominasi entitas suku yang ada, akan tetapi pergesekan antar etnis nyaris tak pernah ada. Kondisi itu terjadi karena hubungan di antara mereka dilandasi oleh kasih sayang dan saling menghargai. Kalaupun konflik pernah terjadi, bentuk maupun besarnya tak pernah mengusung nama suku, apalagi agama. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan kompleksitas kepentingan di antara mereka, maka konflik pun muncul.

Konflik di kabupaten Poso Sulawesi Tengah ini berlangsung sejak tahun 1998 dengan korban tewas ratusan orang dan sekitar 5.000 rumah hangus terbakar. Sebagian pengamat mengatakan bahwa konflik yang terjadi di Poso merupakan konflik horizontal antar agama. Konflik yang terjadi lebih dilihat dari aspek SARA (suku, agama, ras, dan antar kelompok). Padahal, faktor-faktor seperti kehadiran pendatang serta masuknya kekuatan dari luar seperti laskar jihad juga memiliki pengaruh munculnya konflik di daerah ini⁴³.

⁴³ <http://buletinlitbang.dephan.go.id/> Diakses pada hari jumat, 17 April 2009, Pukul 23.15 WITA.



Apabila diperhatikan secara cermat, konflik Poso terjadi karena adanya kesenjangan politik pemerintahan dan sosial ekonomi. Kesenjangan politik pemerintahan dipicu oleh adanya pergeseran pemegang tampuk pemerintahan di daerah. Pergeseran dari pemerintahan kolonial Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia ikut menyebabkan bergesernya kekuasaan di wilayah Poso yang pada awalnya dipegang oleh etnik lokal yakni suku Pamona ke tangan etnik pendatang. Pergeseran ini juga berimplikasi terhadap proses rekrutmen pegawai negeri sipil daerah. Sementara itu, terjadi pula pergeseran lokasi kegiatan ekonomi dari tempat lama ke tempat yang baru tentu berimplikasi terhadap penguasaan aktivitas ekonominya, karena ada kecenderungan bahwa berpindahnya pusat pemerintahan mengundang bergesernya pusat-pusat perekonomian dan perdagangan mendekati pusat-pusat pemerintahan yang baru. Singkatnya terjadi akumulasi kegiatan di pusat pemerintahan baru yang mayoritas penduduknya adalah muslim.

Sementara itu, kesenjangan sosial ekonomi diawali dengan masuknya pendatang ke Poso. Para pendatang yang berasal dari Tanah Toraja masuk ke Poso dari arah selatan dan dari arah utara berasal dari Minahasa dan Sangir Talaud. Mereka pada umumnya beragama Kristen. Kemudian para pendatang yang beragama Islam berasal dari suku Bugis dan Gorontalo juga masuk ke Poso. Karena itu, wilayah Poso Pesisir dan Kota Poso serta Pamona Selatan cukup banyak desa-desa Kristen dan desa-desa Islam berselang-seling dan bertetangga di satu pihak. Sedangkan wilayah Pamona Utara sampai dengan wilayah yang berbatasan dengan wilayah Poso Pesisir dan Kota Poso serta ke Barat dengan

wilayah Lore Utara dan Lore Selatan yang sangat didominasi oleh mayoritas Kristen. Jadi secara geografis, umat Kristen yang mendiami bagian tengah dari wilayah Poso terjepit baik dari arah Utara maupun Selatan dimana proporsi umat Islam semakin besar mendekati proporsi umat Kristen⁴⁴.

Para Pendatang umumnya lebih kuat, muda dan mempunyai daya juang untuk mampu bertahan di daerah baru. Kedatangan para pendatang ini juga menyebabkan terjadinya peralihan lahan dari yang dahulunya atas kepemilikan penduduk asli, kemudian beralih kepemilikannya kepada para pendatang. Proses peralihan kepemilikan tersebut terjadi melalui program pemerintah dalam bentuk transmigrasi maupun penjualan lahan-lahan pada para migran. Arus migrasi masuk ini cukup deras terjadi semenjak dasawarsa 1970-an dan 1980-an dimana program transmigrasi dilakukan dan dibukanya jalur prasarana angkutan darat, Trans-Sulawesi. Dikembangkannya tanaman bernilai ekonomi tinggi seperti kakao dan kelapa (kopra) oleh para pendatang tentunya telah menghasilkan peningkatan kesejahteraan para pemiliknya. Walau penduduk asli mengikuti pola tanam yang sama dengan pendatang, akan tetapi penguasaan pemasaran hasil-hasilnya dikuasai oleh para pendatang. Penduduk asli merasa dirugikan dengan keadaan tersebut. Hal itu dapat dilihat dari dua hal yaitu pertama, lahan pertaniannya sebagian telah beralih kepemilikannya kepada pendatang. Kedua, penghasilan yang diperoleh dari sektor pertanian lebih besar dinikmati oleh para pendatang yang berprofesi sebagai pedagang.

⁴⁴ <http://www.balipost.co.id/> Diakses pada hari jumat, tanggal 17 April 2009, pukul 23. 30 WITA



Perkembangan sosial ekonomi yang semakin hari semakin pesat mendorong lahirnya dinamika politik di antara anggota masyarakat. Dinamika itu mudah dipicu oleh adanya perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan agama yang dianut. Hal itu mendorong kedua umat beragama di Poso ini semakin berhadapan-hadapan secara diametral. Kenyataan transformasi struktural kemudian mengendap dalam kesadaran kolektif masing-masing umat beragama. Tepat pada saat inilah para warga setiap umat itu kemudian mulai bertarung. Pertarungan itu dilakukan dalam arena politik dengan memperebutkan berbagai posisi strategis baik dalam partai-partai politik maupun dalam pemerintahan. Selama masing-masing pihak berhasil meraih posisi-posisi strategis itu secara berimbang, maka pertarungan itu tidak menjalar dalam bentuk kekerasan fisik. Berakhirnya masa jabatan Bupati lama dan dimulainya pemilihan Bupati baru membuka peluang pertarungan baru yang ternyata gagal diselesaikan secara politik. Maka berubahlah pertarungan itu menjadi pertarungan fisik. Hal ini termasuk salah satu sifat kebinatangan.

2. Deklarasi Malino

Terwujudnya perjanjian damai secara permanen yang dikenal dengan "Deklarasi Malino untuk Poso" di Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan yaitu pada 18-20 Desember 2001. Hal itu tidak terlepas dari adanya inisiatif dari Menko Kesra H.M. Jusuf Kalla sebagai penggerak utama pemerintah pusat dalam proses Deklarasi Malino. Beliau berusaha membangkitkan kembali sifat manusiawi dari pihak-pihak yang bertikai. Latar belakang yang dimiliki oleh seorang H.M. Jusuf Kalla sebagai tokoh,

politisi dan pebisnis berpengalaman asal Bugis yang memiliki jaringan luas di Sulawesi, memiliki tutur kata dengan bahasa yang sederhana menjadi suatu nilai tambah bagi keberhasilan proses perdamaian Malino. Terwujudnya perjanjian damai Malino ini juga didukung oleh kuatnya keinginan kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik kekerasan di Poso, pemerintah hanya memfasilitasi perundingan damai tersebut.

H.M. Jusuf Kalla dalam menyelesaikan konflik Poso berpegang pada pemikirannya bahwa

"Ada pihak yang merasakan ketidakadilan yang sangat mendasar dan hilangnya hegemoni serta dominasi yang pernah digenggam sangat lama. Kelompok ini geram karena terbangnya hegemoni. Ada pula kelompok berbeda yang merasakan adanya potensi ketidakadilan, tetapi sungguh tidak bisa berbuat apa-apa. Aneka masalah ini kemudian melahirkan ketidakharmonisan, sehingga masalah yang amat kecil sudah dapat memicu konflik besar."⁴⁵

Pemikiran H.M. Jusuf Kalla tersebut di atas menyiratkan bahwa setidaknya konflik Poso terjadi karena dua alasan tersebut. *Pertama*, adanya ketidakadilan yang terjadi khususnya dalam hal ekonomi. Ketidakadilan itu merupakan salah satu sifat kebinatangan yakni keinginan untuk menguasai sumber daya secara berlebih dari yang lainnya. Para pendatang umumnya mendapatkan penghasilan yang tinggi dari proses ekonomi yang terjadi. Mereka mendapatkan penghasilan yang tinggi karena mereka bekerja lebih giat dari pada penduduk asli. Tekun dan giatnya Para pendatang dalam bekerja bisa jadi dilandasi oleh falsafah bahwa mereka keluar meninggalkan kampung halamannya

⁴⁵ Tomi Lebang, 2006, *Berbekal Seribu Akal Pemerintahan Dengan Logika, Sari Pati Pidato Wakil Presiden Jusuf Kalla*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal 51



untuk mencari uang di negeri orang. Mereka harus bekerja keras di negeri orang agar bisa bertahan hidup dan memperoleh kesuksesan seperti yang dicita-citakan pada saat mereka keluar meninggalkan kampungnya. Hal itu sejalan dengan pendapat Herbert Spencer yang mengatakan bahwa yang bertahan lama itu adalah yang paling baik. Sementara, penduduk asli terlena dengan kebanggaan-kebangganya bahwa merekalah pemilik asli dari tanah Poso. Sehingga ketika semakin lama perbedaan status ekonomi mereka dengan para pendatang, menyebabkan adanya kecemburuan sosial. Mereka kemudian ini dengan para pendatang yang perlahan kehidupan ekonominya semakin baik.

Kedua, penduduk asli mengklaim bahwa para pendatang telah merebut tanah mereka. Hal itu juga bermula dari kecemburuan dalam hal ekonomi. Setelah para pendatang yang telah bekerja keras dan memperoleh kehidupan yang semakin baik, maka penduduk asli pun merasa bahwa haknya telah dirampas. Sifat ini juga merupakan bagian dari sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia. Mereka menyalahkan keberadaan para pendatang yang umumnya berlokasi di pusat kota atau pusat pemerintahan. Padahal, kenyataannya para pendatang mampu menguasai perekonomian karena mereka umumnya bekerja di sektor perdagangan. Akibatnya, kaum pendatanglah yang nampak mengatur peredaran barang dan jasa. Sementara penduduk asli tetap bekerja sebagai petani penyedia barang untuk diperdagangkan oleh para pendatang.

Pemikiran dari H.M. Jusuf Kalla ini adalah pemikiran yang cemerlang mengingat kebanyakan tokoh dan pengamat berpendapat bahwa konflik yang terjadi hanya semata-mata karena konflik SARA. Beliau mampu melihat lebih

dalam bahwa yang bertikai adalah kaum pendatang yang kebetulan beragama Islam dan penduduk asli yang umumnya beragama Kristen. Tetapi secara umum konflik tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi dan hegemoni. Bukan karena perbedaan agama apalagi perbedaan suku.

Pemikiran H.M. Jusuf Kalla ini sekaligus menjadi alat analisis tersendiri bagi beliau. Dengan mengetahui latar belakang penyebab terjadinya konflik, maka beliau mampu merumuskan strategi untuk menyelesaikannya. Pemikiran yang cukup sederhana tetapi mendalam ini telah membuatnya sukses untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik. Beliau menempuh dua langkah dalam proses perdamaian tersebut. Langkah pertama yang dilakukan oleh H.M. Jusuf Kalla adalah mencari tokoh-tokoh dari setiap faksi-faksi yang berkonflik. Beliau bertemu dan berdialog secara terbuka dengan tokoh-tokoh dari kelompok Islam. Setelah itu, beliau bertemu dan berdialog dengan tokoh-tokoh kelompok kristen. Beliau menyerap aspirasi dari masing-masing kelompok agama kemudian diubah menjadi energi untuk mencari solusi perdamaian.

Langkah kedua adalah mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik. H.M. Jusuf Kalla kemudian mengajak mereka untuk berdialog di Malino yang udaranya lebih sejuk dan dingin agar mereka pun bisa berpikir lebih jernih dan tidak terbawa emosi. Beliau semata-mata menjadi mediator di antara mereka dengan tidak berupaya untuk mengadakan intervensi dan intimidasi. Beliau menghindari gaya militer dan pemaksaan kehendak dalam dialog tersebut. Beliau memberikan sepenuhnya kepada tokoh-tokoh yang bertikai untuk menentukan nasib mereka sendiri. Inilah pemikiran dan gaya perdamaian yang

dipraktekkan oleh H.M. Jusuf Kalla yang mampu diterima dikalangan pihak-pihak yang berkonflik sehingga perdamaian di Poso dapat terwujud.

Esensi penting dari isi deklarasi damai Malino ini disebutkan bahwa kelompok Muslim dan Kristiani dengan hati lapang serta jiwa terbuka sepakat menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan. Mereka juga wajib mentaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum kepada siapa saja yang melanggar serta meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan. Guna menjaga agar suasana damai, mereka menolak pemberlakuan keadaan darurat sipil dan campur tangan pihak asing. Mereka sepakat menghilangkan semua fitnah dan ketidakjujuran terhadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain, demi terciptanya kerukunan hidup bersama. Disepakati juga tentang hak hidup di Poso yang tersirat dari adanya pernyataan bahwa Poso adalah bagian integral dari NKRI, karena itu setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, datang dan tinggal secara damai serta menghormati adat-istiadat setempat. Semua hak dan kepemilikan harus dikembalikan kepada pemilik yang sah sebagaimana sebelum konflik dan perselisihan berlangsung.

Keberhasilan perjanjian damai di Malino disambut baik oleh semua pihak. Dalam mengimplementasikan butir-butir kesepakatan Deklarasi Malino, pemimpin kedua belah pihak bersama dengan pemerintah dan seluruh organisasi masyarakat adat setempat sepakat untuk bekerjasama melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat Poso. Upaya pemulihan pasca deklarasi Malino telah dilakukan dan secara berangsur-angsur para pengungsi telah kembali ke desanya,

kehidupan masyarakat setempat sudah kembali normal dan persaudaraan di antara kedua kelompok masyarakat yang sempat bertikai kembali harmonis, pemerintah pusat dan daerah telah membangun kembali sarana dan prasarana publik yang sempat dirusak dan kehidupan perekonomian serta pemerintahan kembali normal. Pihak Polri dan TNI terus berupaya memulihkan kondisi keamanan dan melakukan penegakan hukum. Usaha-usaha pengembangan perdamaian pada masyarakat dengan sifat dasar yang berbeda. Di satu pihak pendekatan budaya tampaknya cukup efektif. Dalam pemahaman seperti ini, dapat dimengerti mengapa kerukunan masyarakat di beberapa kecamatan di Kabupaten Poso dapat berproses lebih cepat dibandingkan dengan proses kerukunan masyarakat di kecamatan-kecamatan lainnya.

Langkah awal pemerintah dalam rangka penanganan pengungsi Poso pasca Deklarasi Malino antara lain: a) Penyelesaian permasalahan pengungsi melalui upaya rekonsiliasi yang intensif serta dukungan dari berbagai pihak baik yang bertikai, lembaga pemerintah maupun masyarakat untuk mengupayakan situasi yang lebih kondusif; b) Sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana penyelesaian masalah pengungsi secara menyeluruh; c) Implementasi pelaksanaan deklarasi Malino yang meliputi rehabilitasi prasarana dan sarana umum serta rehabilitasi perumahan.

B. Konflik Ambon

Konflik yang terjadi di Ambon memiliki karakteristik yang hampir sama dengan konflik yang terjadi di Poso. Konflik di Ambon juga oleh banyak pengamat mengatakan sebagai konflik SARA. Konflik itu terjadi karena adanya

perbedaan pada ajaran agama yakni Islam dan Kristen. Akan tetapi, setelah dianalisis lebih mendalam maka ternyata konflik tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh adanya perbedaan mendasar dalam hal keyakinan dan agama.

Pada dasarnya konflik di Ambon juga bermotif ekonomi dan hegemoni. Konflik terjadi karena adanya kecemburuan dalam hal ekonomi antara para pendatang dengan penduduk asli. Kesuksesan dan keadaan ekonomi para pendatang yang cenderung meningkat dengan cepat menjadikan penduduk asli merasa tersisih. Mereka menganggap kehadiran para pendatang yang kebanyakan datang sebagai transmigran merupakan ancaman bagi keberlangsungan hidup mereka. Mereka secara terpaksa harus bekerja lebih keras dan bersaing dengan pendatang untuk memperebutkan sumber daya.

Perebutan sumber daya ini menjadi pemicu konflik. Ketika ada pihak yang telah berhasil mendapatkan sumber daya tersebut maka mereka akan mempertahankannya. Bahkan sedapat mungkin mereka bahkan ingin menambah dan menguasai sumber daya yang lain. Di satu sisi, tentu pihak yang belum mendapatkan sumber daya pun akan berusaha sekuat tenaga untuk merebut sumber daya tersebut dari pihak lain. Upaya menguasai dan mempertahankan sumber daya khususnya sumber daya ekonomi dan kekuasaan dapat memicu konflik. Perebutan sumber daya ekonomi yang terjadi yakni keinginan penduduk asli untuk tetap menguasai sektor ekonomi dari tangan para pendatang menjadi sebab awal mula terjadinya konflik di Ambon.

Konflik ekonomi ini kemudian dimanipulasi menjadi konflik agama. Masyarakat dengan analisa yang sangat sederhana kemudian mengambil

kesimpulan yang tergesa-gesa. Mereka hanya melihat pelaku dan orang-orang yang berkonflik saja tanpa berusaha untuk mengetahui apa yang menjadi sebab utama mengapa mereka berkonflik. Mereka hanya melihat bahwa yang berkelahi adalah Islam dan Kristen. Padahal sebenarnya motif konfliknya adalah motif ekonomi. Para imigran yang datang dari pulau Jawa dan wilayah Sulawesi adalah mayoritas Islam, sementara penduduk asli mayoritas beragama Kristen.

Penduduk asli (beragama Kristen) yang kebetulan merasa haknya dalam sektor ekonomi dirampas oleh kaum pendatang yang beragama Islam kemudian berkonflik. Konflik antara pendatang dan penduduk asli yang kebetulan berbeda agama ini dimaknai bukan sebagai konflik ekonomi tetapi sebagai konflik antara Islam dan Kristen. Khususnya ketika terjadi perkelahian maka opini langsung diarahkan dan disimpulkan bahwa yang berkelahi adalah orang Islam dan Kristen. Opini yang seperti inilah yang menyebabkan persatuan komunitas sebagai sesama Islam maupun sebagai sesama Kristen menjadi semakin kuat. Kelompok Islam semakin bersatu dan mengklaim bahwa orang-orang Kristen telah mengganggu dan menyerang mereka. Begitu pula sebaliknya orang Kristen semakin bersatu dan memantapkan barisannya bahwa musuhnya adalah umat Islam yang telah melakukan penyerangan kepada komunitas Kristen. Hal inilah yang semakin memperjelas bahwa seakan-akan konflik yang terjadi adalah konflik antara umat Islam dan Kristen.

H.M. Jusuf Kalla yang memahami betul latar belakang terjadinya konflik tersebut dengan mudah dapat menetapkan strategi untuk menyelesaikannya. Berdasarkan pemikirannya yang cemerlang dan pengalamannya yang telah

mendamaikan Poso, maka beliau pun menempuh cara yang hampir sama saat mendamaikan Poso. Beliau mencari tokoh-tokoh utama dan disegani di setiap kelompok. Setelah itu, tokoh-tokoh ini diajak untuk berdialog dan berunding dengan terbuka untuk mendapatkan kesimpulan yang sama-sama menguntungkan. Semua diserahkan kepada mereka. Bagi beliau yang paling penting adalah bukan konsesi dari perdamaian itu tetapi bagaimana agar pihak-pihak yang bertikai dapat berhenti berkonflik dan segera hidup berdampingan secara rukun seperti sedia kala.

Pemikiran H.M. Jusuf Kalla yang patut untuk dianalisis lebih mendalam adalah pemikirannya yang menyatakan bahwa

“tidak ada suatu bangsa yang dapat berkembang tanpa kemajuan warga masyarakatnya. Apabila umat Islam berkembang dengan baik, apabila umat Kristen berkembang dengan baik, maka pastilah bangsa itu berkembang dengan baik pula. Tidak ada sesuatu yang dapat berkembang apabila yang satu ketinggalan sementara yang satunya maju. Karena itu kebersamaan adalah mutlak untuk kita semua, kebersamaan untuk maju bukan kebersamaan untuk saling menjatuhkan satu sama lain...”⁴⁶

Pemikiran beliau memang cukup sederhana tetapi sangat mendalam maknanya. Sifat manusiawi selalu mendominasi pemikirannya. Pemikiran ini menyiratkan bahwa ketika Indonesia ingin maju maka persatuan dan kebersamaan mutlak harus ada. Persatuan dan kebersamaan itu bukan hanya di antara sesama suku, golongan atau agama saja, melainkan persatuan di antara semua warga negara. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa harus dimajukan secara bersama. Tidak boleh suku yang satu maju sementara suku yang lain

⁴⁶ *Ibid*, hal 43

tertinggal. Tidak boleh suku yang satu diperhatikan sementara suku yang lain diabaikan. Suku bangsa yang satu tidak boleh menguasai dan memaksakan kehendak kepada suku yang lain. Suku-suku yang ada harus memiliki kedudukan yang sama sebagai suku bangsa.

Selain suku bangsa, agama juga harus diposisikan sama. Tidak boleh agama yang satu lebih diutamakan dari agama yang lain. Tidak boleh agama tertentu mendapatkan keistimewaan dan perhatian yang berlebihan sementara agama yang lain diabaikan dan dikucilkan. Semua agama yang diakui keberadaannya dalam negara ini harus mendapatkan perlakuan yang sama karena negara kita bukanlah negara agama. Olehnya itu, ketika agama yang satu dimajukan dan diprioritaskan, maka agama yang lain pun harus mendapat perhatian dan prioritas yang sama. Kemajuan agama turut menjadi kemajuan bersama. Persatuan dan kerjasama harus terjalin di antara sesama warga negara bukan hanya di antara warga yang seagama.

Persatuan dan kebersamaan itu harus diwujudkan sebagai sesama warga negara bukan sebagai sesama agama. Kebersamaan yang tercipta adalah kebersamaan untuk maju bukan justru kebersamaan untuk saling menjatuhkan. Persatuan tidak diwujudkan untuk mengalahkan suku lain. Kebersamaan yang terbentuk bukan digunakan untuk saling menyerang kelompok dan agama lain. Kebersamaan ini hendaknya adalah semangat untuk membangun Indonesia sebagai negara yang lebih maju. Ketika semangat persatuan dan kebersamaan telah terbentuk sebagai sesama warga negara, maka Indonesia bisa menjadi negara berkembang yang cepat maju mengingat potensi sumber daya alam dan

sumber daya manusia yang begitu besar. Potensi dan anugerah ini harus dikembangkan bukan justru dihancurkan dengan perselisihan dan konflik di antara sesama warga negara yang kebetulan berbeda suku maupun keyakinan agama.

Pemikiran dari H.M. Jusuf Kalla tersebut semakin diperkuat dengan pemikirannya yang lain yakni

"tidak ada satu daerah yang maju tanpa kerukunan dan kedamaian, karena di daerah yang tanpa kedamaian orang tidak bisa bekerja, orang tidak bisa mencari kehidupan dan tidak ada ketenangan. Karena itu, berbahagialah kita dengan semua Rahmat Tuhan yang ada di daerah ini. Banyak bangsa yang maju; juga bangsa yang tidak maju. Daerah yang maju, bangsa yang maju bukan hanya ditentukan oleh sumber daya alamnya, oleh banyak penduduknya, tetapi lebih banyak ditentukan oleh budaya, kultur, dan pendidikan serta semangat yang tinggi dari wilayah tersebut. Karena itulah budaya dengan dasar pendidikan, budaya yang saling menghargai yang timbul di daerah ini haruslah dijaga sebaik-baiknya dan dikembangkan serta menjadi contoh untuk seluruh bangsa ini."⁴⁷

Pernyataan dari H.M. Jusuf Kalla ini menjelaskan tentang pentingnya kerukunan dan kedamaian. Pemikiran ini juga merupakan dominasi dari sifat manusiawi yang dimilikinya (sikap saling menghargai). Sifat tersebut mendorongnya untuk memikirkan kemajuan bangsa dengan mewujudkan perdamaian. Maju tidaknya suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alamnya yang melimpah, tetapi bagaimana kehidupan sosial dari masyarakat di daerah tersebut. Ada banyak daerah yang tanahnya subur dan sumber alamnya yang melimpah tetapi masyarakatnya tidak sejahtera dan daerah tersebut tidak

⁴⁷ *Ibid*, hal 47



maju. Hal itu disebabkan karena tidak adanya kerukunan dan kedamaian di daerah tersebut. Justru yang terjadi adalah pertikaian dan konflik di antara sesama warga.

Ambon sebagai suatu daerah yang subur dan memiliki kekayaan rempah-rempah yang begitu melimpah tidak mampu menjadikan masyarakatnya sejahtera dan daerahnya maju. Bagaimanapun suburnya daerah tersebut ketika tidak ada kedamaian dan keharmonisan di antara sesama warga, maka daerah tersebut tidak akan berkembang. Tanah yang subur itu tidak berguna karena tidak dikelola. Warga tidak mengelola dan menanami tanahnya yang subur karena takut keluar rumah dan datang ke kebun. Mereka takut nanti kalau ke kebun mereka dibunuh. Mereka takut turun ke sawah karena takut meninggalkan rumahnya. Mereka takut kalau nanti rumahnya di bakar. Mereka takut untuk memelihara dan merawat ternaknya karena ternak yang banyak dan gemuk pun dibakar, dibunuh dan bahkan dicuri oleh orang-orang akibat dari keadaan daerah yang tidak aman.

Anak-anak tidak dapat ke sekolah karena takut diculik dan dibunuh. Walaupun mereka diisinkan dan diantar oleh orang tua mereka ke sekolah mereka tetap tidak bisa sekolah karena sekolah telah dibakar, fasilitasnya dirusak dan bahkan guru-guru pun takut untuk datang mengajar. Terhentinya aktifitas belajar mengajar di sekolah berarti terhenti pula proses pencerdasan generasi. Padahal telah diketahui, bahwa untuk menjadi negara yang maju maka harus didukung oleh kekuatan dan kualitas dari sumber daya manusia. Bagaimanapun besarnya dan melimpahnya sumber daya alam kalau sumber daya manusianya tidak berkualitas, maka sumber daya alam itu tidak dapat dikelola dan dinikmati dengan baik.

Masyarakat takut untuk datang ke pasar. Mereka takut untuk berdagang kembali. Padahal perekonomian hanya akan bergerak ketika ada pasar dan ada pedagang. Ketika aktivitas jual beli tidak ada maka aktivitas dan roda perekonomian pun tidak berjalan. Seluruh masyarakat takut untuk bekerja, takut untuk keluar rumah, takut untuk beraktivitas karena kondisi keamanan yang sedang kacau. Kalau kondisi tidak aman maka aktivitas akan terhenti. Berhentinya aktivitas dan berhentinya orang bekerja menjadi tanda bahwa masyarakat akan semakin sengsara dan daerah akan semakin terbelakang. Bahkan tidak jarang, karena konflik yang terus menerus terjadi, maka kota tersebut menjadi kota mati⁴⁸.

Selain itu, ketika keamanan suatu daerah tidak stabil maka investasi di daerah tersebut pasti ikut terhenti. Kalau investasi disuatu daerah telah terhenti berarti lapangan pekerjaan di daerah tersebut juga menjadi sedikit. Tidak adanya lapangan pekerjaan menjadikan pengangguran semakin bertambah. Ketika pengangguran bertambah maka jumlah orang miskin secara otomatis juga ikut bertambah, karena pengangguran adalah orang yang tidak bekerja atau tidak berpenghasilan. Dampak lain dari pengangguran yang besar adalah jumlah tindak kriminalitas yang juga semakin meningkat.

Jumlah pengangguran yang semakin meningkat menjadikan orang tidak berpenghasilan juga meningkat. Satu-satunya cara agar pengangguran tidak bertambah banyak adalah membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas.

⁴⁸ <http://www.mail-archive.com/eskol@mitra.net.id/> Diakses pada hari kamis, 23 April 2009, pukul 21:00 WITA

Lapangan pekerjaan akan terbuka lebih banyak ketika proyek dan pembangunan dapat berjalan. Sementara pembangunan akan berjalan ketika ada investasi. Begitu pula, investor hanya akan masuk menanamkan investasinya di daerah tersebut ketika kondisi keamanan daerah itu terjaga. Olehnya itu, kerukunan dan kedamaian mutlak harus diwujudkan.

C. Konflik Aceh

Sebelum menjelaskan tentang strategi, peran, dan pemikiran H.M. Jusuf Kalla dalam menyelesaikan konflik di Aceh, lebih dahulu akan dipaparkan tentang latar belakang lahirnya keinginan masyarakat Aceh untuk lepas dari NKRI. Disamping itu akan dijelaskan pula strategi H.M Jusuf Kalla dalam menyelesaikan konflik di Aceh.

1. Latar Belakang Konflik

Aceh memiliki sejarah militansi memerangi orang-orang Portugis di tahun 1520-an dan penjajah Belanda sejak tahun 1873 sampai 1913, dan melancarkan perlawanan Islam terhadap Republik Indonesia di tahun 1953. Perlawanan itu, oleh Indonesia disebut sebagai pemberontakan Darul Islam yang bertujuan mendirikan sebuah Republik Islam atas seluruh wilayah Indonesia, hal yang juga menjadi tujuan kelompok-kelompok Islam militan di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan⁴⁹.

Pemberontakan itu kemudian berakhir pada tahun 1962 ketika Presiden Soekarno memberi jaminan bahwa Aceh akan diberi status sebagai sebuah daerah

⁴⁹ <http://www.mail-archive.com/jaker@yahoogroups.com/> Diakses pada hari kamis, 23 April 2009, pukul 21:23 WITA

istimewa dengan otonomi luas di bidang agama, hukum, adat, dan pendidikan. Tetapi, selama bertahun-tahun ternyata janji itu secara umum tidak terpenuhi.

Pemberontakan separatis di Aceh dewasa disebabkan oleh janji Soekarno yang belum terpenuhi. Pemberontakan tersebut dimulai tanggal 4 Desember 1976. Saat itu Muhammad Hasan di Tiro mendeklarasikan kemerdekaan Aceh. Di Tiro dan para pengikut setianya telah terlibat dalam pemberontakan Darul Islam tahun 1953, tetapi pemberontakan kali ini mereka sebut dengan nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berniat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah mereka mendeklarasikan kemerdekaan tersebut, kekuatan bersenjata GAM pun mulai menyerang pasukan pemerintah. Hal itu mendorong operasi penumpasan pemberontakan oleh pemerintah. Sebenarnya pada tahun 1983, kekuatan GAM sudah dikalahkan di lapangan dan Di Tiro lari ke luar negeri. Ia bersama beberapa pengikutnya akhirnya menjadi warga negara Swedia. Akan tetapi, GAM kembali merasionalisasi status politiknya dan memperkuat sayap militer Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM). Pada periode itu, sebagian dari 400 kader AGAM dilaporkan dikirim ke Libya untuk latihan militer. Tahun 1989, GAM merasa cukup kuat untuk sekali lagi melawan militer pemerintah Indonesia. Kemudian GAM kembali menyerang pasukan pemerintah, warga sipil, dan orang-orang yang dicurigai sebagai mata-mata. Pemerintah

membalas dengan operasi militer yang bertujuan untuk melakukan penumpasan yang berskala besar.⁵⁰

Pada tahun 1992, tampak bahwa Pemerintah mengendalikan situasi sepenuhnya. Tetapi operasi militer yang ditandai dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia, memicu keberatan publik terhadap Pemerintah di Jakarta. Pelanggaran hak asasi manusia di Aceh menjadi sorotan publik tidak lama setelah Presiden Soeharto lengser dari kekuasaan dalam kerusuhan politik Mei 1998.

Pangab Jenderal Wiranto yang terus ditekan oleh publik di seluruh Indonesia atas penganiayaan dan pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, akhirnya meminta maaf. Ia meminta maaf atas ekses-ekses militer mulai dari tahun 1989 sampai 1998. Jenderal Wiranto juga mencabut status Aceh sebagai sebuah Daerah Operasi Militer (DOM) dan menjanjikan penarikan tentara dalam jumlah besar dari provinsi itu. Meski demikian, perdamaian tak kunjung datang karena GAM memanfaatkan demoralisasi militer tersebut dengan melancarkan serangan besar-besaran. Konfrontasi bersenjata pun kembali dimulai.⁵¹

Pertengahan tahun 1994, organisasi GAM pecah ketika para pejabat GAM yang berbasis di Kuala Lumpur mengarahkan dukungannya kepada kepemimpinan GAM yang berbasis di Swedia, termasuk Hasan di Tiro. Tampaknya perbedaan utama antara dua faksi GAM itu ialah mengenai bentuk pemerintahan Aceh setelah kemerdekaan. Di Tiro lebih suka sebuah monarki dengan dirinya sebagai Sultannya, sedangkan kelompok Kuala Lumpur

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

menghendaki sebuah Republik Islam modern. Di Tiro yang mengklaim diri sebagai keturunan Sultan Aceh mendapatkan dukungan dari sebagian besar kekuatan GAM yang beroperasi di provinsi itu.

GAM tidak pernah berhenti untuk melakukan penyerangan kepada pihak militer Indonesia. Akan tetapi, selama pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, terdapat sebuah peluang bagi perdamaian di Aceh yang bisa diraih bersama kedua pihak, setidaknya untuk sementara waktu. Tawaran dialog dari Presiden Abdurrahman Wahid diterima secara positif oleh faksi GAM pimpinan Hasan di Tiro. Pada bulan Mei 2000, wakil dari Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani sebuah dokumen perjanjian di Jenewa yang disebut "*Saling Pengertian bagi Jeda Kemanusiaan untuk Aceh*".⁵²

Tujuan dari perjanjian itu adalah untuk memberi kesempatan bagi penyaluran bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan rakyat Aceh. Hal itu dicapai melalui serangkaian perundingan rahasia yang dimediasi Henri Dunant Center, sebuah LSM internasional. Saling pengertian yang ditandatangani itu merupakan langkah awal untuk membangun rasa saling percaya. Hal itu dimaksudkan untuk menciptakan landasan bersama bagi kedua pihak untuk melanjutkan dialog.

Perunding dari pihak Indonesia diwakili oleh Hassan Wirajuda yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa yang kemudian menjadi Menteri Luar Negeri RI. Pemerintah RI dengan hati-hati menjelaskan bahwa Hassan Wirajuda yang mewakili Pemerintah, tidak berunding dalam

⁵² <http://www.mail-archive.com/eskol@mitra.net.id.Op.cit>

kapasitasnya sebagai Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa. Keterangan ini untuk meredam banyaknya kritikan bahwa dengan berunding dengan GAM, Pemerintah sudah melakukan kesalahan besar. Kesiediaan berunding dengan GAM mengimplikasikan pengakuan dan menempatkan GAM setidaknya secara teoretis dalam posisi sejajar dengan Pemerintah. Perundingan itu juga menjadikan pihak GAM sudah mengantongi sebuah kemenangan diplomatik. Bagi sejumlah anggota parlemen, akademisi, dan media massa menganggap pertemuan di Jenewa itu mempresentasikan internasionalisasi masalah Aceh. Reaksi negatif ini menjadi lebih mudah dimengerti karena banyak kalangan menilai lepasnya Provinsi Timor Timur sebagai konsekuensi dari internasionalisasi masalah Timor Timur.

Kendati demikian, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terus mengupayakan dialog. Meski mengalami kesulitan di lapangan seperti kekokohan pihak GAM untuk tetap merdeka, tetapi dialog terus dilanjutkan. Pada Januari 2001 kedua pihak telah mencapai saling pengertian sementara. Saling pengertian itu mencakup ketentuan-ketentuan yang memungkinkan pengaturan mengenai pemeriksaan pelanggaran yang terjadi dan menjalankan upaya-upaya membangun saling kepercayaan. Sampai pertengahan 2001 pihak Pemerintah masih terus menawarkan otonomi khusus dan kedua pihak sepakat mengadakan dialog informal yang melibatkan berbagai pihak yaitu semua sektor masyarakat Aceh termasuk GAM. Tetapi selama tujuh bulan sesudah itu, dari Juli 2001 sampai

Februari 2002, dialog mengalami kebuntuan terutama karena kesulitan-kesulitan di lapangan akibat meningkatnya kontak senjata.⁵³

Sementara itu, di struktur pemerintahan telah terjadi pengalihan kekuasaan. Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi presiden menggantikan Abdurrahman Wahid, setelah diberhentikan oleh MPR RI tahun 2002. Presiden Megawati Soekarnoputri yang lebih berpandangan nasionalis dibanding Abdurrahman Wahid, kemudian menunjuk perunding pihak Indonesia yakni Hassan Wirajuda sebagai Menlu RI. Pemerintah pun berhasil membangun kepercayaan dalam wilayah Asia Tenggara. Kepercayaan itu juga diperoleh dari beberapa di antara beragam negara yang menjalin hubungan bilateral dengan Indonesia. Selain itu, pemerintah juga membangun kepercayaan kepada forum-forum internasional seperti Gerakan Non-Blok (GNB), Konferensi Organisasi Islam (OKI), Uni Eropa (EU) dan lain-lain. Terdapat dukungan sangat kuat bagi kedaulatan dan integritas wilayah Republik Indonesia khususnya yang berhubungan dengan kasus Aceh dan masalah Papua. Sementara itu, GAM tidak mendapatkan dukungan eksternal atas klaimnya untuk menjadi negara tersendiri kecuali dari beberapa LSM.

Masyarakat Aceh sudah lelah hidup di tengah-tengah konflik. Keberhasilan menyelesaikan konflik di Maluku dan Sulawesi Tengah melalui proses perdamaian Malino, Pemerintah RI merasakan adanya momentum untuk juga segera menyelesaikan masalah Aceh. Pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, telah mengafirmasi secara terbuka lewat berbagai pernyataan dan

⁵³ <http://www.mail-archive.com/jaker@yahoogroups.Op.cit>

dokumen bahwa penyelesaian terbaik ialah melalui dialog. Dialog tersebut dalam kerangka sebuah pendekatan komprehensif yang juga mencakup penggunaan militer dan pekerjaan polisi. Akan tetapi, terdapat persepsi yang luas dalam pemerintah termasuk parlemen bahwa kekuatan bersenjata Indonesia berada di atas GAM. Sampai hari ini, banyak dari mereka yang berpersepsi seperti itu dan merasa bahwa tidak perlu mengadakan perundingan dengan sebuah gerakan separatis yang kalah dan lemah yang tidak mendapat dukungan internasional.

Bahkan ada juga yang berkeyakinan bahwa hanya ada satu hal yang harus dilakukan terhadap gerakan separatis ialah dengan menumpasnya. Meski demikian, pemerintah terus berupaya agar dialog bisa terus digulirkan dengan pihak GAM. Pemerintah tetap ingin melanjutkan proses negosiasi dengan pikiran mengkonsolidasi yang sudah dicapai selama ini dalam bentuk dokumen. Bahkan kalau memungkinkan dalam bentuk sebuah persetujuan sementara. Persetujuan itu, mencakup butir konsensus dan butir pengembangannya lebih lanjut sehingga pertemuan-pertemuan lanjutan antara kedua pihak akan memiliki landasan yang lebih kuat. Sebagaimana disepakati sebelumnya, kedua pihak membentuk sebuah Dewan Bersama untuk Dialog Politik yang dapat diterima kedua pihak.

Pemerintah melalui juru rundingnya senantiasa melakukan pertemuan dan perundingan dengan GAM. Dalam perundingan itu diakui bahwa keinginan rakyat Aceh untuk memerintah diri mereka sendiri secara damai dalam kebebasan dan demokratis. Hal itu akan dicapai melalui tiga langkah aksi utama yakni *pertama*, konflik akan dihentikan dan perdamaian ditegakkan selama periode transisi dan otonomi khusus akan diterima sebagai penyelesaian final atas konflik. *Kedua*,

selama periode transisi, sikap permusuhan dihentikan, sedangkan proses penciptaan saling percaya diintensifkan dan kehidupan sosial-ekonomi di Aceh dinormalkan dengan program bantuan kemanusiaan dan bantuan ekonomi dari Pemerintah Indonesia dan komunitas internasional. *Ketiga*, dialog yang mencakup semua unsur masyarakat Aceh termasuk GAM akan menjadi forum konsultatif bagi pencapaian penyelesaian damai yang ternegosiasikan atas masalah Aceh.⁵⁴

Penyelesaian ini didasarkan atas Undang-Undang Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Undang-undang tersebut merupakan sebuah Undang-Undang yang disetujui di masa Presiden Abdurrahman Wahid yang memberi status otonomi khusus bagi propinsi Aceh. Setelah selesainya dialog dengan semua unsur Aceh tersebut, maka diadakan persiapan penyelenggaraan pemilihan umum di Aceh untuk memungkinkan para pengikut GAM berpartisipasi dalam pemilihan umum Indonesia 2004.

Kesepakatan sementara kedua pihak tersebut kemudian dijalankan bersama. Pada pertemuan Februari 2002, pihak pemerintah Indonesia menjelaskan kepada Henri Dunant Centre dan semua penasihat tentang gagasan yang menjadi isi panduan usulan yang pemerintah telah gariskan. Secara umum mereka menanggapinya secara positif khususnya karena menurut panduan usulan itu dimungkinkan dialog terus berjalan tanpa secara eksplisit membahas isu sensitif tentang tuntutan GAM untuk kemerdekaan Aceh. Satu-satunya sumber kesulitan ialah inti posisi Pemerintah yakni keharusan bagi pihak GAM untuk menerima tawaran otonomi khusus dari Pemerintah yang dinyatakan dalam Undang-Undang

⁵⁴ <http://www.mail-archive.com/eskol@mitra.net.id.Op.cit>

NAD. Penerimaan otonomi tersebut oleh GAM mengimplikasikan ditinggalkannya tuntutan kemerdekaan Aceh.

Kedua pihak telah berunding secara intensif dalam pertemuan Februari itu, tetapi pada akhirnya pihak GAM tidak bersedia menandatangani sebuah pernyataan bersama yang sedianya menjadi hasil pertemuan tersebut. Waktu itu GAM beralasan membutuhkan waktu lebih banyak untuk mempertimbangkan tawaran otonomi dari pemerintah. Oleh karena itu, rancangan pernyataan bersama itu tidak bisa dikeluarkan bersama oleh kedua pihak sehingga disepakati bahwa fasilitator Henri Dunant Centre akan mengeluarkannya atas namanya sendiri.

Naskah rancangan pernyataan bersama itu secara jelas menyatakan bahwa kedua pihak sepakat menggunakan Undang-Undang NAD. Undang-Undang tersebut sebagai titik awal diskusi-diskusi. Selanjutnya, selama periode penciptaan saling percaya tersebut kedua pihak menghentikan permusuhan dan kemudian bergerak maju menuju pemilihan yang demokratis di Aceh pada tahun 2004. Oleh karena itu, dokumen ini menjadi semacam peta jalan untuk proses perdamaian ke depan, saling menahan diri dalam melakukan kontak senjata, semakin mengintensifkan dialog yang melibatkan semua unsur masyarakat Aceh, serta melibatkan diri dalam pemilihan umum.

Konsep perdamaian yang telah digagas tersebut menemui kesulitan. Kesulitan timbul ketika kedua pihak menginterpretasikan secara berbeda isi dokumen yang sama. Pemerintah berpikir bahwa dokumen itu sudah mengamankan komitmen GAM menerima Undang-Undang NAD sebagai sebuah langkah awal. Sedangkan GAM memaknai isi dokumen itu hanya sebagai bahan

pertama untuk dibahas bersama. Juru bicara utama GAM, Sofyan Ibrahim setibanya kembali di Aceh membantah keras bahwa GAM sudah menerima Undang-Undang NAD. Perbedaan tafsir ini kemudian diperburuk oleh unsur-unsur bersenjata yang mengklaim sebagai kekuatan GAM yang mulai menyerang fasilitas-fasilitas pemerintah, khususnya tiang-tiang listrik dan membunuh warga sipil yang tidak bersalah termasuk perempuan dan anak-anak.

TNI kembali bereaksi dengan mengerahkan lebih banyak pasukan militer ke Aceh dan mengintensifkan operasi penumpasan kerusuhan. Kejadian itu mengikuti pola bahwa setiap kali kedua pihak mencapai suatu persetujuan, unsur-unsur di lapangan pasti mengeluarkan pernyataan-pernyataan bantahan atau penolakan lalu melancarkan aksi kekerasan. Hal inilah yang selalu merusak proses dialog sehingga pertemuan ketiga yang semestinya dilaksanakan Juni 2002, batal digelar karena situasi buruk di lapangan. Kemudian tanggal 19 Agustus 2002 Pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan baru tentang Aceh. GAM diberi kesempatan sampai akhir bulan Ramadhan yakni tanggal 7 Desember 2002, untuk menerima tawaran otonomi khusus sebagai prasyarat bagi dialog lebih lanjut atau harus menghadapi kekuatan militer Indonesia.⁵⁵

Tawaran dari pemerintah tersebut ternyata tidak diterima oleh pihak GAM. Pemerintah pun kembali melakukan serangan militer untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka. Hal itu berlanjut hingga diadakannya pemilu. Pemilu secara langsung dilaksanakan pada tahun 2004 dan menetapkan SBY-JK sebagai

⁵⁵ *Ibid.*



pemenang. Sebagai wakil presiden terpilih, H.M. Jusuf Kalla langsung merumuskan strategi perdamaian di tanah rencong (Nangro Aceh Darussalam).

2. Strategi H.M. Jusuf Kalla

Sebelum mengemukakan pemikiran dan strategi H.M. Jusuf Kalla dalam menyelesaikan konflik Aceh, hal yang paling utama untuk diketahui dan diperjelas adalah apa yang menjadi alasan utama rakyat Aceh melakukan perlawanan tersebut. Konflik di Aceh seperti yang telah diungkapkan sebelumnya adalah konflik yang berbeda dengan konflik di daerah lain seperti di Poso dan Ambon. Konflik Aceh bukan konflik etnis yakni antara etnis Aceh dengan etnis Jawa maupun dengan etnis yang lainnya. Bukan pula konflik agama. Konflik yang terjadi adalah konflik antara rakyat Aceh dengan pemerintah Republik Indonesia.

Rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap pemerintah karena dianggap telah berbuat tidak adil kepadanya. Rakyat Aceh merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah telah berbuat tidak adil dalam hal ekonomi dan politik kepada mereka. Sumber daya alam sebagai kekayaan alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, telah dihisap oleh pemerintah pusat. Sementara, pembangunan di daerahnya tidak selancar dan secepat dengan daerah lain yang justru memiliki kekayaan alam lebih sedikit dari daerah mereka. Perlawanan tersebut sebagai bentuk protes rakyat kepada pemerintah untuk berbuat lebih adil kepada mereka. Hal itu merupakan sifat kebinatangan pemerintah pusat yakni kerakusan dalam mengambil sumber daya di daerah.

Fakta memang membuktikan bahwa Aceh adalah daerah yang memiliki sumber daya alam sangat besar khususnya minyak dan gas alam. Di Aceh terdapat ladang gas yang kini dikelola oleh ExxonMobil. Tetapi sungguh ironis mengingat Aceh yang memiliki gas dan minyak yang begitu besar, ternyata tidak mampu menempatkannya sebagai daerah maju dan menjadikan masyarakatnya sejahtera. Justru yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Aceh merupakan satu propinsi miskin di Indonesia dengan jumlah penduduknya sekitar 28,3 persen hidup di bawah garis kemiskinan⁵⁶.

H.M Jusuf Kalla yang telah berpengalaman menyelesaikan konflik di berbagai daerah telah merintis usaha perdamaian di Aceh sejak beliau masih menjabat sebagai Menko Kesra. Beliau mendalami dan mencari penyebab utama dari berontaknya rakyat Aceh untuk memerdekakan diri dari NKRI. Mengingat waktu yang terbatas dan kesibukan beliau dalam menangani dan menyelesaikan konflik di berbagai daerah, maka konflik di Aceh baru semakin fokus ditangani oleh beliau sejak ditetapkan sebagai wakil presiden. Setelah menyelesaikan konflik di Poso dan Ambon, beliau segera membuat strategi untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Konflik di Aceh yang memiliki karakteristik sangat berbeda dengan konflik di Poso dan Ambon tentu membuat beliau harus mengambil langkah yang juga berbeda.

H.M. Jusuf Kalla telah mengetahui cara menyelesaikan kasus Aceh. Beliau telah mengetahui karakteristik konflik Aceh sejak masih menjabat sebagai Menko Kesra. Pemikiran politiknya yang menarik untuk dikaji sebagai strategi

⁵⁶ Muhammad Rais, *Op.cit.*, hal 19

beliau dalam menyelesaikan konflik Aceh diantaranya adalah pernyataannya yang mengatakan "*Solusi Aceh hanya ada dua pilihannya, mau damai atau perang terus*".⁵⁷

Pemikiran itu sekali lagi menurut penulis cukup sederhana tetapi mengandung makna yang sangat mendalam. Beliau ingin menggiring pemikiran masyarakat Aceh khususnya pihak GAM untuk mengutamakan sifat manusiawi. Beliau berusaha membangkitkan sifat manusiawi mereka untuk mencintai kedamaian. Pemikirannya tersebut bermakna bahwa suasana damai dan tenteram lebih baik daripada berkonflik. Perang hanya akan menimbulkan kerusakan dan penderitaan bagi seluruh rakyat Aceh.

Pemikiran H.M. Jusuf Kalla juga mengisyaratkan adanya ketegasan dari seorang yang lembut seperti beliau. Ketegasan dari pernyataannya itu juga tidak mengandung sikap keotoriterian yang bergaya militeris. Beliau ingin memberikan ketegasan kepada rakyat Aceh yang dimotori oleh GAM untuk menentukan sikap bahwa mereka mau tetap berkonflik atau berdamai. Mereka mau tetap berperang melawan pemerintah atau berhenti melawan dan duduk berdialog untuk mencari jalan yang saling menguntungkan.

Apabila pemikiran itu dianalisis lebih jauh maka akan didapatkan nilai tambah dari beliau khususnya dalam penyelesaian kasus Aceh. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah terbuka untuk masalah ini. H.M. Jusuf Kalla tidak bertindak sebagai seorang diktator untuk mengambil sikap lebih dahulu terhadap nasib Aceh. Beliau justru memberikan pilihan itu pada mereka.

⁵⁷ Tomi Lebang, *Op.cit.*, hal. 25

Beliau menginginkan agar rakyat Acehlah yang mengambil keputusan. Setelah mereka mengambil keputusan yang terbaik, maka selanjutnya pemerintah akan mengambil kebijakan sesuai dengan keputusan yang telah mereka pilih. Ketika mereka menetapkan pilihan untuk berdamai maka secara tegas H.M. Jusuf Kalla meminta kepada GAM dan rakyat Aceh untuk tegas pula dan konsisten kalau memang mau berdamai. Tentu ini adalah langkah dan pemikiran baru.

Penulis mengatakan langkah dan pemikiran baru karena dari beberapa langkah perdamaian yang telah ditempuh oleh beberapa presiden sebelumnya seperti Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati, ternyata perdamaian itu belum terwujud sepenuhnya. Berulang kali pihak Indonesia dan pihak GAM berembuk dan berdialog. Berulang kali juga dokumen dan perjanjian telah ditandatangani di meja perundingan. Bahkan beberapa mediator termasuk mediator internasional seperti Henri Dunant Center ditunjuk untuk menjembatani kepentingan perundingan kedua belah pihak. Tetapi konsep perundingan, dialog, kesepekatan, dan perjanjian damai yang telah ditandatangani hanya berjalan sementara. Pemerintah berupaya konsisten tetapi pihak GAM justru berkhianat atas perjanjian tersebut.

Fakta telah menunjukkan betapa dipermainkannya pemerintah Indonesia oleh pihak GAM. Pihak GAM memanfaatkan perjanjian damai untuk sementara waktu. Perjanjian itu hanya digunakan untuk menghentikan kontak senjata dalam beberapa saat saja. Pada kondisi dan waktu tidak perang inilah yang dimanfaatkan oleh pihak GAM untuk berkonsentari dan mengadakan konsolidasi dalam membangun kekuatan baru. Setelah kekuatan baru telah disusun dan mereka

menganggap sudah kuat kembali untuk melawan pemerintah, maka strategi selanjutnya adalah GAM kembali menyerang dan berperang dengan pemerintah. Hal ini menunjukkan betapa tidak berwibawanya pemerintah dan bahkan secara kasar dapat dikatakan bahwa pemerintah dipermainkan dan dibodoh-bodohi oleh pihak GAM.

Sesuatu yang sangat berbeda dengan pemikiran dari H.M. Jusuf Kalla. Pernyataan untuk memberikan kesempatan kepada GAM dalam memilih di antara dua pilihan yakni mau damai atau perang, tentu menunjukkan ketegasan dan kewibawaan dari pemerintah. Pemerintah tidak ingin mengulang sejarah yang buruk dengan terus dipermainkan oleh mereka. Pemerintah ingin agar pihak GAM tahu bahwa pemerintah akan bertindak tegas dengan pilihan yang telah mereka tetapkan. Inilah nilai tambah yang membuat H.M. Jusuf Kalla disegani oleh tokoh dan pimpinan GAM. Ini pula yang menjadikan pemerintah kelihatan lebih berwibawa di hadapan GAM saat melakukan pertemuan.

Pernyataan dari H.M. Jusuf Kalla ternyata ditanggapi positif oleh pihak GAM. GAM dan rakyat Aceh menerima tawaran itu dengan mengambil keputusan untuk menghentikan perlawanan dan melanjutkannya dengan perundingan untuk damai. Pihak GAM begitu percaya dengan pemerintah dalam hal ini percaya kepada H.M. Jusuf Kalla. Mereka telah menempatkan beliau sebagai seorang yang dapat dipercaya untuk mengayomi dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka.

Kepercayaan adalah hal yang sangat mahal bagi pihak Aceh. GAM terlanjur menempatkan pemerintah sebagai lawan yang tidak pernah mereka dapat

percaya. Mereka sudah beberapa kali dibohongi dan juga dihianati oleh pemerintah. Dalam beberapa kesempatan, mereka diundang dan diajak untuk berdamai. Tetapi setelah mereka berdialog di meja perundingan dan tidak menemui kesepakatan, maka wakil-wakil mereka kemudian ditangkapi oleh pemerintah. Hal ini juga menjadi bagian dari kesulitan yang dihadapi oleh H.M. Jusuf Kalla untuk membuat pihak GAM kembali percaya kepada ajakan pemerintah.

H.M. Jusuf Kalla memang terkenal sebagai seorang saudagar Bugis yang memegang falsafah hidup yakni *Lemppu'* (orang yang jujur), *Getteng* (dapat dipercaya), dan *warani* (orang yang berani) menjadikan GAM percaya pada sosoknya. GAM memutuskan untuk menerima ajakan damai itu dan yakin bahwa H.M Jusuf Kalla sebagai wakil presiden dapat dipercaya dan dapat melaksanakan kesepakatan-kesepakatan di meja perundingan nantinya. Kepercayaan GAM semakin bertambah dengan keterbukaan dan rasa persaudaraan yang ditunjukkan oleh beliau. Beliau dengan sangat terbuka dan tidak segan-segan menelepon langsung pimpinan dan Panglima GAM untuk membicarakan dan menanyakan perkembangan dari perdamaian yang telah digagas. Beliau menelepon pimpinan dan tokoh GAM layaknya sebagai bagian dari mereka sehingga GAM sangat menaruh hormat kepadanya⁵⁸.

Hal yang ditempuh oleh H.M Jusuf Kalla untuk mewujudkan perdamaian itu adalah meminta Finlandia untuk menjadi tempat perundingan antara Indonesia dan pihak GAM. Ada hal yang menarik dan penuh filosofi dari pemikiran H.M

⁵⁸ Harian Fajar Makassar, *Ketegangan Helsinki Diredam dari Jakarta*, hari sabtu, 04 April 2009

Jusuf Kalla untuk mengadakan perundingan itu di Helsinki-Finlandia. Ada kesamaan dan situasi tempat perundingan antara Indonesia dengan GAM dan tempat perundingan pihak-pihak yang berkonflik di Ambon dan Poso. Kalau konflik Ambon dan Poso beliau selesaikan dengan mengundang pihak-pihak yang bertikai ke daerah Malino, maka Jusuf Kalla mengundang GAM untuk berunding di Helsinki. Malino dan Helsinki memiliki kesamaan situasi.

Malino terletak di daerah pegunungan di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan dengan kondisi cuaca yang dingin. Begitupula Helsinki adalah daerah yang cuacanya dingin. Asumsi ini menandakan bahwa H.M. Jusuf Kalla ingin mengulang suksesnya dalam mendamaikan konflik Poso dan Ambon. Beliau menginginkan agar proses perdamaian juga bisa berlangsung dalam perundingan dengan GAM. Selain itu, sengaja Beliau memilih tempat yang dingin agar kedua belah pihak dapat berpikir dingin dalam menyelesaikan masalah. Bagaimanapun panasnya kepala, begitu membaranya hati, begitu emosionalnya jiwa, tetapi dengan kondisi yang dingin diharapkan semua akan ikut dingin dan tujuan damai yang dicita-citakan dapat terwujud.

Agenda pertemuan dan perundingan dengan GAM pun disusun dengan baik. Perundingan dimulai pada hari jumat 28 Januari 2005. Masing-masing pihak terdiri atas lima orang yakni pihak Indonesia dipimpin oleh Hamid Awaluddin sebagai ketua delegasi. Anggota dari delegasi Indonesia yakni Sofyan Djalil, Farid Husein, Usman Basya, dan Gusti Agung Wesaka Puja. Sementara dari pihak GAM dipimpin oleh Malik Mahmud. Anggotanya terdiri atas Zaini Abdullah, Nur



Djuli, Nurdin Abdul Rachman, dan Bachtiar Abdullah. Adapun yang menjadi fasilitator adalah Martti Ahtisaari, Hannu Himanen, Juha Chrestense, dan Maria⁵⁹.

Pihak Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Wakil Indonesia itu telah diberikan bekal oleh H.M. Jusuf Kalla tentang hal-hal yang harus dilakukan. Begitu cerdas dan mendalamnya peran beliau dalam perdamaian itu diakui sendiri oleh ketua tim runding yakni Hamid Awaluddin dengan menempatkan H.M. Jusuf Kalla sebagai arsitek sekaligus mandor perdamaian di Aceh. H.M Jusuf Kalla yang mengatur semua dan terus mengawasi serta memberikan petunjuk agar perjanjian damai itu dapat ditandatangani. Beliau telah membekali mereka dengan strategi dan panduan damai yang beliau tuliskan dalam dua lembar kertas HVS. Beliau begitu hati-hati dan mempersiapkan segalanya. Beliau telah menyampaikan dengan tegas kepada wakil Indonesia tentang hal-hal apa saja yang diminta Indonesia dan permintaan apa saja dari pihak GAM yang boleh diterima oleh pihak Indonesia.

Ketika mereka menemui jalan buntu maka wakil Indonesia mendapat bimbingan dan jalan keluar melalui telepon. Bukan hanya wakil Indonesia yang berkonsultasi kepada beliau, tetapi ketua tim fasilitator dalam hal ini mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari pun menelepon dan meminta petunjuk kepada beliau. Beliau juga tidak segan menelepon langsung Panglima GAM Musakkir Manaf untuk menanyakan perkembangan perdamaian. Jangankan hal yang besar, hal yang sangat sepele pun diawasi oleh beliau. Beliau bahkan mengajarkan

⁵⁹ *Harian Fajar Makassar, Bermadalkan Keikhlasan dan Integritas, hari jumat, 03 April 2009*

kepada wakil Indonesia tentang tata cara memulai percakapan, strategi dalam bertutur kata dengan wakil GAM, bahkan sampai warna baju yang digunakan dalam perundingan tersebut, semua tidak luput dari pengamatan dan bimbingannya.

Walaupun perundingan ini dapat disepakati tapi tentu ada halangan dan ketegangan yang terjadi selama perundingan berlangsung. Ada keinginan dan permintaan dari pihak GAM yang tidak bisa dipenuhi dan dikabulkan oleh pemerintah. Begitu pula ada permintaan dan keinginan dari pemerintah yang tidak dapat diterima oleh GAM. Disinilah peran seorang H.M. Jusuf Kalla kembali diuji. Pemikiran dan strateginya selama perundingan berlangsung semakin menarik untuk dianalisis. Meskipun beliau tidak hadir dan ikut berunding tetapi hampir dapat dipastikan bahwa strategi beliaulah yang menentukan perjanjian ini dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pemikiran beliau yang tertuang dalam pernyataan-pernyataannya membuat proses perdamaian dapat berjalan lancar dan berakhir dengan memuaskan sesuai harapan. Pemikirannya tersebut yakni "*tujuan Indonesia adalah Aceh itu tidak merdeka, tidak ada referendum, tetap wilayah kesatuan, tetap UUD 1945, itu inti pokok, harus tetap dengan sistem kita*"⁶⁰.

Disinilah sekali lagi dapat dilihat betapa tegasnya beliau dalam menyelesaikan konflik Aceh. Secara singkat dapat dipahami bahwa beliau membolehkan GAM untuk meminta apa saja asal jangan meminta merdeka dan referendum. Pernyataan ini menyiratkan kepada masyarakat khususnya rakyat

⁶⁰ Tomi Lebang, Op.cit., hal 24

Aceh dan GAM bahwa pemerintah tidak akan pernah memberikan kemerdekaan. Kalau Aceh mau berdamai maka Aceh harus tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap dengan UUD 1945, dan dalam bentuk Republik.

Menurut H.M. Jusuf Kalla bahwa ketika perundingan diadakan dan GAM masih diberi kelonggaran serta permintaannya tidak dibatasi maka pemerintah sama saja dengan menyerahkan kebebasan kepada Aceh untuk merdeka. Oleh karena itu, sejak awal beliau telah mengingatkan bahwa perundingan itu diadakan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih layak kepada rakyat Aceh. Perundingan diadakan untuk membahas bagaimana nasib Aceh, bagaimana nasib anggota GAM, dan sekali lagi bukan untuk membahas tentang kemerdekaan Aceh. Beliau juga membatasi pembahasan tentang referendum. Beliau sadar betul akan sejarah. Beliau tidak ingin mengulang kejadian di Timor-Timor dengan mengadakan referendum dan akhirnya Timor-Timor pun lepas dan memerdekakan diri.

Perundingan berjalan alot dengan tarik ulur kepentingan akhirnya membuahkan hasil yang membahagian. Perundingan ini berakhir dengan kesepakatan bahwa antara pihak pemerintah dan GAM sepakat untuk menandatangani perjanjian pada bulan Agustus 2005. Hamid Awaluddin yang menjadi ketua delegasi menyatakan bahwa

“...yang pasti, tiga kali dua halaman kertas folio, kerangka negosiasi damai dengan GAM yang dibuat JK, telah mengubah sejarah: kekerasan di Aceh dikubur, nyawa manusia diselamatkan, kohesi sosial direkatkan, dan anak-anak Aceh kembali tumbuh dengan riang menyongsong masa depan yang lebih gemilang”⁶¹.

⁶¹ *Harian Fajar Makassar, Hamid: Wapres Arsitek Pondok Kedamaian, hari minggu, 05 April 2009*

Pemikiran dari H.M Jusuf Kalla telah menempatkan beliau sebagai juru damai yang handal. Pemikiran inilah yang mampu mendamaikan Aceh secara menyeluruh. Pemikiran beliau telah menjadikan Aceh kembali damai dan masyarakatnya dapat bekerja kembali serta dapat hidup layak seperti di daerah lainnya.

D. Konflik Papua

Konflik di Papua akan dibahas seperti dengan pembahasan pada konflik-konflik di daerah lain. Pada bagian ini akan diutarakan tentang keadaan sosial budaya rakyat Papua dan hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya konflik serta strategi dalam menyelesaikannya. Konflik Papua sengaja dibahas untuk menjelaskan bahwa pemikiran H.M. Jusuf Kalla dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik di daerah tersebut.

1. Keadaan Sosial Budaya

Sudah sejak lama ujung barat laut Irian dan seluruh pantai utara penduduknya dipengaruhi oleh penduduk dari kepulauan Maluku, maka tidak mengherankan apabila suku-suku bangsa disepanjang pesisir pantai (Fak-Fak, Sorong, Manokwari dan Teluk Cenderawasih) lebih pantas digolongkan sebagai Ras Melanesia dari pada Ras Papua. Zending atau misi Kristen Protestan dari Jerman (Ottow & Geissler) tiba di pulau Mansinam Manokwari 5 Februari 1855 untuk selanjutnya menyebarkan ajaran agama disepanjang pesisir pantai utara Irian. Pada tanggal 5 Februari 1935, tercatat lebih dari 50.000 orang menganut agama Kristen Protestan. Pembagian kedua kelompok agama tersebut kelihatannya identik dengan keadaan di Negeri Belanda dimana Kristen Protestan

di Utara dan Kristen Katholik di Selatan⁶². Kemudian pada tahun 1898 pemerintah Hindia Belanda membuka Pos Pemerintahan pertama di Fak-Fak dan Manokwari dan dilanjutkan dengan membuka pos pemerintah di Merauke pada tahun 1902.

Belanda juga memperhatikan sektor pendidikan. Guru sekolah dan guru agama umumnya berasal dari Indonesia Timur dan pelajaran diberikan dalam bahasa Melayu. Pendidikan mendapat jatah yang cukup besar dalam anggaran pemerintah Belanda. Pada tahun-tahun terakhir masa penjajahan, anggaran pendidikan ini mencapai 11% dari seluruh pengeluaran tahun 1961. Akan tetapi pendidikan tidak disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor perekonomian modern karena yang lebih diutamakan adalah nilai-nilai Belanda dan agama Kristen. Pada akhir tahun 1961 rencana pendidikan diarahkan kepada usaha peningkatan keterampilan, tetapi lebih diutamakan pendidikan untuk kemajuan rohani dan kemasyarakatan. Walaupun bahasa melayu dijadikan sebagai bahasa "Franca" (Lingua Franca), bahasa Belanda tetap diajarkan sebagai bahasa wajib mulai dari sekolah dasar.⁶³

Sementara itu, mengenai kebudayaan penduduk atau kultur masyarakat di Irian Barat juga beraneka ragam. Beberapa suku mempunyai kebudayaan yang cukup tinggi dan mengagumkan yaitu suku-suku di Pantai Selatan Irian yang kini lebih dikenal dengan suku Asmat. Kelompok suku ini terkenal karena memiliki kehebatan dari segi ukir dan tari. Budaya penduduk Irian yang beraneka ragam itu

⁶² <http://www.generasi-pembebasan.blogspot.com/> Diakses pada hari kamis, 23 April 2009, pukul 21.40 WITA

⁶³ *Ibid.*

dapat ditandai oleh jumlah bahasa lokal khususnya di Irian Barat. Terdapat sekitar 224 bahasa lokal di Irian Barat. Bahasa di Irian Barat digolongkan kedalam kelompok bahasa Melanesia dan diklasifikasikan dalam 31 kelompok bahasa yaitu: Tobati, Kuime, Sewan, Kauwerawet, Pauwi, Ambai, Turu, Wondama, Roon, Hatam, Arfak, Karon, Kapaur, Waoisiran, Mimika, Kapauku, Moni, Ingkipulu, Pesechem, Teliformin, Awin, Mandobo, Auyu, Sohur, Boazi, Klader, Komoron, Jap, Marind-Anim, Jenan, dan Serki. Jumlah pemakai bahasa tersebut sangat bervariasi mulai dari puluhan orang sampai puluhan ribu orang.

Secara tradisional, tipe pemukiman masyarakat Irian Barat dapat dibagi ke dalam 4 kelompok. Setiap tipe mempunyai corak kehidupan sosial ekonomi dan budaya tersendiri. Kelompok pertama yaitu penduduk pesisir pantai. Penduduk ini mata pencaharian utama sebagai nelayan disamping berkebun dan meramu sagu yang disesuaikan dengan lingkungan pemukiman itu. Komunikasi dengan kota dan masyarakat luar sudah tidak asing bagi mereka.

Kelompok kedua adalah penduduk pedalaman yang mendiami dataran rendah. Mereka termasuk peramu sagu, berkebun, menangkap ikan disungai, berburu dihuta disekeliling lingkungannya. Mereka senang mengembara dalam kelompok kecil. Mereka ada yang mendiami tanah kering, ada yang mendiami rawa, dan payau serta sepanjang aliran sungai. Adat Istiadat mereka ketat dan selalu mencurigai pendatang baru.

Kelompok ketiga yakni penduduk pegunungan yang mendiami lembah. Mereka bercocok tanam dan memelihara babi sebagai ternak utama, kadang kala mereka berburu dan memetik hasil dari hutan. Pola pemukimannya tetap secara

berkelompok, dengan penampilan yang ramah bila dibandingkan dengan penduduk tipe kedua. Adat istiadat dijalankan secara ketat dengan pesta babi sebagai simbolnya. Ketat dalam memegang dan menepati janji. Pembalasan dendam merupakan suatu tindakan heroisme dalam mencari keseimbangan sosial melalui perang suku yang dapat diibaratkan sebagai pertandingan atau kompetisi. Sifat curiga terhadap orang asing ada tetapi tidak seketat penduduk tipe kedua.

Kelompok keempat merupakan penduduk pegunungan yang mendiami lereng-lereng gunung. Melihat tempat pemukimannya yang tetap di lereng-lereng gunung, memberi kesan bahwa mereka ini menempati tempat yang strategis terhadap jangkauan musuh sedini mungkin selalu mendeteksi setiap makhluk hidup yang mendekati pemukimannya. Adat istiadat mereka sangat ketat, sebagian masih kanibal hingga kini, dan bunuh diri merupakan tindakan terpuji bila melanggar adat karena akan menghindarkan bencana dari seluruh kelompok masyarakatnya. Perang suku merupakan aktivitas untuk mencari keseimbangan sosial. Kecurigaan pada orang asing juga masih tinggi.

Pada waktu Belanda meninggalkan Irian Barat, posisi-posisi dalam pemerintahan diserahkan kepada putra daerah (orang Papua/Irian Barat) sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Seluruh rumah dan harta termasuk gedung dan tanah milik orang Belanda juga diserahkan kepada kenalan mereka orang Papua (pembantu dan teman sekerja) untuk dimiliki, karena mereka tidak bisa menjualnya dan juga tidak ada pembeli pada masa itu.

Belanda juga meninggalkan eksese konflik antara suku-suku besar sebagai akibat dari aktivitas politik. Terdapat pertentangan antara elite pro-Papua dan elite

pro-Indonesia yang ditandai dengan pertentangan antara suku Biak melawan suku Serui dan suku Tanah Merah-Jayapura melawan suku Serui. Sekalipun dalam hal ini tidak semua orang Biak itu pro-Papua dan tidak semua orang Serui itu pro-Indonesia serta tidak semua orang Tanah Merah-Jayapura itu pro-Papua dan pro-Indonesia.

Berdasarkan pengalaman Belanda di Indonesia atau Hindia-Belanda dalam kemerdekaan tahun 1945, maka Belanda didalam menjajah Irian Barat sangat hati-hati sekali dalam meningkatkan kehidupan Masyarakat di berbagai bidang. Belanda sengaja memperlambat perkembangan di Papua sesuai dengan permintahaan dan kebutuhan mereka. Hal itu merupakan suatu bentuk etis politik gaya baru. Termasuk didalamnya usaha untuk membentuk nasionalisme Papua. Cara Belanda yang demikian itu menyebabkan orang-orang Irian Jaya tidak merasa bahwa mereka sedang dijajah, sebab mereka hidup dalam suatu keadaan perekonomian yang baik dan tidak merasakan adanya penderitaan dan tekanan dari Belanda.

2. Konflik dan Penyelesaiannya

Konflik yang terjadi di Papua sebenarnya memiliki kemiripan dengan konflik yang terjadi di Aceh. Konflik yang terjadi bukan konflik karena agama maupun suku. Kalaupun ada konflik yang terjadi karena suku, itu merupakan konflik yang sudah biasa karena adat yang mengharuskan demikian. Masalahnya pun adalah masalah sepele. Terkadang ada komunitas dari suku yang satu mengambil tanaman ubi di ladang milik suku yang lain, sehingga suku yang diambil tananaman ubinya merasa keberatan dan kemudian terjadilah

perselisihan. Konflik jenis ini adalah konflik yang biasa dan memang sering terjadi di Papua dari dulu sampai sekarang.

Konflik yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah konflik yang lebih besar yakni konflik yang menyebabkan munculnya gerakan separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM). Keberadaan OPM ini menjadi salah satu masalah besar di negara ini mengingat OPM merupakan suatu organisasi yang sejak berdiri sampai sekarang memiliki tuntutan hanya satu yakni agar Papua merdeka seperti Timor-Timor. Konflik inilah yang akan dianalisis penyebab dan penyelesaiannya.

Keberadaan OPM yang menginginkan kemerdekaan dan memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kemiripan dengan keberadaan GAM di Aceh yang juga menginginkan agar Aceh diberikan kemerdekaan penuh. Munculnya OPM di Papua juga memiliki kesamaan latar belakang dengan GAM. Kedua organisasi ini muncul karena adanya rasa sakit hati terhadap pemerintah pusat. OPM melihat bahwa pemerintah pusat telah bertindak tidak adil. Papua sebagai salah satu daerah di Indonesia tidak mendapatkan prioritas pembangunan yang sama dengan daerah lain. Mereka tidak menikmati pembangunan yang sama dengan daerah yang lainnya terutama daerah di pulau Jawa. Sarana dan sarana perekonomian termasuk infrastruktur jalan sebagai penunjang mobilitas masyarakat tidak mendapatkan perhatian yang layak. Mereka juga mengeluhkan lambatnya pembangunan seperti jembatan. mereka membandingkan keadaan di daerah lain terutama di pulau Jawa yang sudah

memiliki jalan tol yang bertingkat-tingkat sementara di Papua jembatan saja tidak dibangun.

Ketidakadilan itu semakin terasa mengingat Papua merupakan daerah dengan kekayaan alam yang begitu melimpah. Di wilayah Papua terdapat gunung emas yang kini dikelola oleh PT Freeport Indonesia, anak perusahaan Freeport McMoRan Copper & Gold, produsen emas dan tembaga terbesar di dunia. Sejak bulan April tahun 1967 Freeport telah memulai kegiatan eksplorasinya di Papua yang diperkirakan mengandung cadangan bijih emas terbesar di dunia dengan cadangan terukur lebih dari 3.046 ton emas, 31 juta ton tembaga, 10.000 ton perak yang diperkirakan tidak akan habis dikeruk hingga 34 tahun mendatang. Melalui Kontrak Karya I Freeport telah mengantongi keuntungan US\$ 1,5 Miliar tahun 1996. Kemudian tak tanggung-tanggung sepanjang tahun 1998 Freeport Indonesia mampu menghasilkan agregat penjualan 1,71 Miliar ton tembaga dan 2,77 juta ons emas⁶⁴

Protes rakyat Papua terhadap pemerintah pusat dikarenakan kekayaan alam yang mereka miliki tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di daerah termasuk di sekitar daerah pertambangan. Daerah mereka juga masih terbelakang. Bahkan menurut data dari BPS pada tahun 2004, Papua merupakan propinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia yakni sekitar 38,7 persen dari total penduduknya. Hal inilah yang menjadikan rakyat Papua merasa dianaktirikan oleh pemerintah. Kekayaan daerah mereka tidak dinikmati dan digunakan untuk membangun daerahnya, melainkan dibawa oleh

⁶⁴ Muhammad Rais, *Op.cit.*, hal 13

pihak asing dan sebagian lainnya dinikmati oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah yang lain.⁶⁵

Selain itu, keberadaan dari perusahaan tambang di daerah mereka juga menimbulkan dampak sosial yang sangat merugikan. Dampak sosial dari keberadaan perusahaan tambang seperti PT Freeport Indonesia tidak bisa di pandang remeh. Berlimpahnya dana yang beredar di sana justru melahirkan bisnis prostitusi dan perjudian. Ironisnya, dari tahun ke tahun bisnis prostitusi ini cenderung mengalami peningkatan hampir 70%. Sebagai contoh di Timika yang merupakan tempat pertambangan Freeport berdasarkan hasil dari investigasi sebuah LSM disebutkan bahwa Timika adalah kota dengan penderita HIV/AIDS terbanyak di Indonesia⁶⁶

Begitu pula dengan kasus pelanggaran HAM. Sesuai dengan kajian yang dilakukan Dianto Bachriadi tentang pelanggaran-pelanggaran HAM pada industri pertambangan di Indonesia dengan studi kasus pada PT Freeport dan PT Kelian Equatorial Mining menunjukkan paling tidak terdapat 8 bentuk pelanggaran HAM yang ditemukan yaitu pelanggaran atas hak untuk menentukan nasib sendiri, termasuk di dalamnya adalah tidak diakuinya tanah-tanah adat yang menjadi milik seseorang, keluarga atau suku tertentu, dan tidak diakuinya struktur sosial masyarakat adat serta pemaksaan untuk alih fungsi lahan menjadi area pertambangan, pelanggaran atas hak untuk hidup, Penghilangan orang dan penangkapan secara sewenang-wenang, hilangnya hak untuk bebas dari rasa

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ HTI. 2006, *Penambangan Oleh Freeport: Penjajahan Berkedok Investasi*. Buletin Al-Islam, edisi 295/9 Maret.

takut, Hilangnya hak seseorang untuk tidak mendapat penyiksaan atau tindak kekerasan, khususnya yang dilakukan oleh pejabat publik, Dicabutnya hak seseorang atas sumber penghidupan subsistensinya, Hilangnya hak anak-anak untuk mendapatkan perlindungan, Hilangnya standar kehidupan yang layak dan pencapaian tingkat kesehatan yang optimal yaitu hak atas lingkungan hidup yang sehat.

Kekayaan alam yang begitu besar di Papua hanya dinikmati oleh pihak luar saja. Mereka terus mengeruk kekayaan alam di bumi Papua dan menikmati hasilnya. Sementara di sisi lain, keuntungan yang sangat besar itu justru menimbulkan kerugian bagi penduduk asli dan daerah. Inilah yang menjadi dasar dari pergerakan rakyat untuk meminta keadilan melalui keinginan rakyat untuk kemerdekaan agar mereka dapat menikmati hasil kekayaan alamnya sendiri.

OPM sebagai organisasi yang terus menggulirkan perlawanan terhadap pemerintah telah beberapa kali diperangi dan ditangkapi oleh pemerintah. Akan tetapi ternyata mereka tetap ada dan pengikut mereka pun tidak pernah habis. Keberadaan dan perlawanan yang dilakukan oleh OPM ternyata mendapat dukungan dan simpati dari sebagian besar rakyat Papua, seperti halnya GAM yang mendapat simpati rakyat Aceh. Anggota OPM tidak dapat terdeteksi satu-persatu mengingat rakyat sipil Papua pun memberikan dukungan dan bahkan ada yang menjadi anggota dari OPM secara sembunyi-sembunyi. Beberapa langkah dan strategi telah dilakukan oleh pemerintah sejak lama untuk mengatasi dan meredam perlawanan ini. Namun, strategi dan langkah-langkah damai maupun

militer yang telah dilakukan belum mampu memberikan penyelesaian yang menyeluruh terhadap masalah ini.

H.M. Jusuf Kalla yang kini menjabat sebagai wakil presiden telah menunjukkan dirinya sebagai juru runding yang handal. Beliau telah menyelesaikan kasus dan konflik Poso, Ambon, dan Aceh. Beliau menginginkan agar Papua juga dapat diatasi segera. Beliau menginginkan agar rakyat Papua dapat hidup normal kembali tanpa dikecam oleh rasa takut. Rakyat Papua harus hidup layak dan bebas untuk bekerja seperti biasa. Begitu pula, OPM harus berhenti untuk melakukan perlawanan dan mengacaukan keadaan dengan terus melawan dan memerangi pemerintah. Mereka harus berhenti untuk meminta kemerdekaan. Oleh karena itu, H.M. Jusuf Kalla mendalami keinginan-keinginan mereka agar dapat berunding dengan pemerintah demi menciptakan perdamaian di Papua.

Pemikiran H.M Jusuf Kalla untuk menyelesaikan kasus ini adalah seperti pada pernyataannya " *saya mendekati kedua belah pihak yang berkonflik dan mengajak mereka untuk meninggalkan perbedaan, untuk maju dengan persamaan-persamaan ke meja perundingan*"⁶⁷.

Pemikiran ini memiliki makna yang sangat mendalam dan sekaligus menjadi alat yang ampuh untuk mewujudkan perdamaian di Papua. Pemikiran ini mengisyaratkan bagaimana seorang H.M Jusuf Kalla dalam menyelesaikan konflik dengan terlebih dahulu mencari dan memastikan hal yang melatarbelakangi sampai keinginan untuk merdeka itu muncul. Setelah ia

⁶⁷ Tomi Lebang, Op.cit., hal 53

mengetahui alasan mendasar dari timbul dan bergejolaknya konflik, maka selanjutnya ia menyusun strategi untuk mengajak agar pihak-pihak yang berkonflik dapat maju ke meja perundingan.

H.M. Jusuf Kalla akan mengajak dan membujuk pimpinan dan tokoh-tokoh berpengaruh di OPM untuk mau diajak berunding dengan pemerintah. Hal ini bukan berarti bahwa pemerintah merasa kalah, melainkan pemerintah dalam hal ini H.M. Jusuf Kalla tidak ingin mengulang sejarah buruk. Cara dan strategi militer yang ditempuh dan dipraktekkan oleh pemerintah sebelumnya yang ternyata tidak mampu memberikan kedamaian. Ia menginginkan agar kedamaian itu terwujud dengan menghindari aksi kekerasan dan militer yang dapat berakibat jatuhnya banyak korban sipil.

Langkah untuk menyelesaikan konflik di Papua akan sama dengan langkah dalam menyelesaikan konflik Aceh. Kesamaan strategi penyelesaian konflik ini disebabkan oleh adanya kesamaan timbulnya konflik. H.M Jusuf Kalla dalam menyelesaikan konflik selalu mendahulukan kemenangan bersama yakni kalau bisa diselesaikan dengan duduk bersama, lalu kenapa harus dengan perang yang justru dapat merugikan kedua belah pihak. Di satu sisi, pemerintah akan mengeluarkan energi dan ongkos yang banyak. Sementara di sisi lain korban dan kerugian yang diakibatkan oleh perang juga pasti lebih banyak lagi.

Pemikiran H.M Jusuf Kalla semakin menarik untuk dipahami dan dianalisis mengingat beliau sebelumnya adalah saudagar yang sukses. Ia terlebih dahulu sukses di bidang bisnis kemudian melanjutkan kesuksesannya di bidang politik. Tatkala hendak mendamaikan kedua belah pihak, ia selalu mempelajari

terlebih dahulu sejarah daerah yang sedang konflik tersebut. Ia mendalami sosial, budaya dan ekonominya. Ia juga mencermati latar belakang agama, keadaan geografisnya, maupun aspek-aspek lain yang berhubungan dengan dominasi, hegemoni, supremasi, dan potensi ketidakadilan.

Selain itu, ia juga selalu memperhatikan dengan saksama mengenai struktur penduduknya baik sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan sampai pada masa sekarang ini. Ia juga selalu memperhatikan dan mencari tahu tentang pihak-pihak yang berkonflik. Misalnya pihak A berada dalam posisi seperti apa dan pihak B berada dalam posisi seperti apa. Kemudian ia mencari tahu apa yang melatarbelakangi dan yang menjadi persoalan utama yang membuat warga kedua daerah tersebut bertikai dan saling membenci. Inilah yang diperhatikan oleh H.M Jusuf Kalla sebelum ia mengatur dan merancang strategi yang akan digunakan untuk mewujudkan perdamaian. Strategi dan gaya H.M Jusuf Kalla dalam menyelesaikan konflik merupakan modal besar yang dimilikinya sebagai seorang pemimpin negara.



BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan penelusuran dan analisis secara mendalam, maka pada bab ini akan disajikan simpulan tentang pemikiran politik Muhammad Jusuf Kalla. Selain itu, akan disampaikan pula saran-saran yang berkaitan dengan hasil yang dicapai.

A. Simpulan

H.M. Jusuf Kalla memiliki pemikiran politik. Pemikiran politiknya yang cemerlang telah terbukti mampu menyelesaikan berbagai konflik di daerah. Inti dari pemikiran H.M. Jusuf Kalla dalam menyelesaikan semua konflik itu adalah bahwa pada dasarnya manusia memiliki sifat manusiawi dan sifat kebinatangan. Kalau sifat manusiawi dominan maka keadaan akan aman dan damai. Tetapi ketika sifat kebinatangan dalam diri manusia yang dominan maka terjadilah konflik. Oleh karena itu, kalau konflik ingin dihentikan secara damai maka beliau berupaya membangkitkan kembali sifat-sifat manusiawi pada pihak-pihak yang berkonflik. Pemikiran politik tersebut melahirkan strategi-startegi yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan konflik di Poso, Ambon, Aceh dan Papua. Penyelesaian konflik di daerah tersebut berbeda-beda sesuai dengan penyebab terjadinya konflik. Konflik di Poso memiliki kesamaan dengan konflik di Ambon yakni dilatarbelakangi oleh kecemburuan sosial antara kaum pendatang dan penduduk asli dalam sektor ekonomi. Konflik terjadi karena adanya perebutan hegemoni dan kekuasaan dalam sektor ekonomi. Adapun konflik di Aceh memiliki kesamaan dengan konflik di Papua yakni

dilatarbelakangi oleh ketidakadilan ekonomi. Konflik terjadi antara rakyat di daerah dengan pemerintah pusat. Rakyat merasa pemerintah pusat tidak adil mengingat daerah mereka memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi pembangunan di daerah tersebut lamban ketimbang daerah lain yang justru tidak memiliki kekayaan alam yang besar. Mereka akhirnya mendukung gerakan separatis untuk melawan pemerintah agar diberikan kemerdekaan. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan keadilan dan perhatian dari pemerintah.

B. Saran

Mengingat pemikiran seseorang khususnya H.M. Jusuf Kalla terlalu luas dan banyak jumlahnya serta keterbatasan Penulis dalam mengkaji seluruh pemikiran beliau, maka disarankan kepada pihak-pihak lain termasuk mahasiswa untuk mengadakan penelitian lanjutan. Masih banyak pemikiran cemerlang dari beliau yang perlu dikaji dan dianalisis lebih mendalam. Pemikiran-pemikiran cerdas yang dimiliki oleh beliau terbukti mampu membuat Indonesia lebih damai. Kedamaian yang telah terwujud di Indonesia menjadi salah satu modal berharga untuk memajukan negara ini. Gaya dan strategi yang dilakukannya sangat sederhana tetapi memberikan hasil yang maksimal. Hal itu yang jarang dimiliki pemimpin-pemimpin dulu dan sekarang.

Pemikiran beliau dalam bidang apapun khususnya dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, hukum, agama, dan pemerintahan sangat menarik untuk terus dikaji dan dibahas mengingat pemikiran beliau sangat sederhana tetapi mudah dipahami, tegas, dan rasional. Pemikiran-pemikirannya sangat layak untuk diketahui orang banyak bukan hanya kalangan akademisi dan praktisi di berbagai bidang,

melainkan perlu pula diketahui oleh masyarakat secara umum. Oleh karena itu, pemikiran-pemikirannya perlu untuk terus diangkat kepermukaan, diteliti, dibahas, dianalisis, dan kemudian dipublikasikan. Belum lagi, pemikiran-pemikiran beliau selalu diliputi dengan perhitungan-perhitungan yang matang layaknya hitungan dagang yang selalu mendahulukan pertimbangan untung rugi dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Qadir, Tijani. 2001. *Pemikiran Politik dalam Al-Quran*. Jakarta: Gema Insani.
- Abdurahman, Hafidz. 1998. *Islam, Politik dan Spiritual*. Singapura: Lisan Ul-Haq.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2001. *Mafahim Siyasiyah Hizbut Tahrir*. Edisi Mu'tamadah. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Culla, Adi Suryadi. 2006. *Rekonstruksi Civil Society, Wacana dari Aksi Ornop di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Departemen Pendidikan & Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Duverger, Maurice. 1987. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ecip, S. Sinansari. (Penyunting). 2000. *Percikan Pemikiran M. Jusuf Kalla: Mari ke Timur!*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung
- HTI. 2006. *Penambangan Oleh Freeport: Penjajahan Berkedok Investasi*. Buletin Al-Islam, edisi 295/9 Maret
- Ismail, Muhammad. 1993. *Bunga Rampai Pemikiran Islam*. Jakarta:Gema Insani Pres
- Kartaprawira, Rusadi. 1997. *Pemikiran dan Budaya Politik*. Jakarta: Badan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.

- Kartikasari, S. N. (*Penyunting*). 2000. *Mengelola Konflik Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council
- Lebang, Tomi. 2006. *Berbekal Seribu Akal Pemerintahan Dengan Logika, Sari Pati Pidato Wakil Presiden Jusuf Kalla*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy. J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, Hadari. dan Martini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogya: Gaja Mada Uni Press.
- Noer, Deliar. 1983. *Pengantar Ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rais, Muhammad. 2006. *Strategi Pengelolaan Tambang di Indonesia Dalam Mewujudkan Masyarakat Sejahtera*. Sebagai peserta dalam Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) bidang Ilmu Pengetahuan Sosial PIMNAS XIX.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rauf, Maswadi. 2000. *Konsensus Politik, Sebuah Penajagan Teoritis*. Jakarta: LIP Fisip UI kerjasama dengan Mizan.
- Roclee, C. C. 1995. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Raja Grafiika.
- Sunardi, Dkk. 2005. *Republik "Kaum Tikus", Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*. Jakarta: EDSA Mahkota.
- Shihab, Ahmad. 2007. *Muhammad Jusuf Kalla Mewujudkan Perdamaian Berkarya & Berprestasi*. Jakarta: PEACE People Aspiration Center
- Syamsuddin, Nazaruddin. 1988. *Soekarno: Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*. Jakarta: Rajawali Press.

Thaba, Abd Aziz. 2000. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jatim: Al-Izzah.

Tubbs. S.L & Sylvia Moss. 1996. *Human Communication Prinsip-Prinsip Dasar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sumber Data dari Internet:

1. http://www.setwapres.go.id/xhtml/biografi_wapres/ Diakses pada hari senin, 23 Maret 2009, pukul 23.00 WITA
2. <http://buletinlitbang.dephan.go.id/> Diakses pada hari jumat, 17 April 2009, Pukul 23.15 WITA
3. <http://www.balipost.co.id/> Diakses pada hari jumat, tanggal 17 April 2009, pukul 23.30 WITA
4. <http://www.mail-archive.com/eskol@mitra.net.id/> Diakses pada hari kamis, 23 April 2009, pukul 21:00 WITA
5. <http://www.mail-archive.com/jaker@yahooogroups.com/> Diakses pada hari kamis, 23 April 2009, pukul 21:23 WITA
6. <http://www.generasi-pembebasan.blogspot.com/> Diakses pada hari kamis, 23 April 2009, pukul 21.40 WITA

Sumber Data dari Koran:

1. Harian Fajar Makassar. *Bermodalkan Keikhlasan dan Integritas*, hari jumat, 03 April 2009
2. Harian Fajar Makassar. *Ketegangan Helsinki Diredam dari Jakarta*, hari sabtu, 04 April 2009
3. Harian Fajar Makassar. *Hamid: Wapres Arsitek Pondok Kedamaian*, hari minggu, 05 April 2009